

Changing the world
with **women and girls**
act:onaid



MEMIMPIN PERJALANAN

Pelokalan yang Dipimpin Perempuan di Sulawesi Tengah:
Menuju Aksi Transformatif Gender

September 2019



Perempuan lokal memimpin dan mendistribusikan donasi pakaian di sebuah kebun kelapa di Sulawesi Tengah.

Credit: ActionAid

Acknowledgements

Kami ingin menyampaikan terima kasih kepada banyak pihak dan organisasi yang memberikan waktu dan wawasan mereka untuk membantu menyatukan laporan ini. Kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih khusus kepada rekan-rekan di Sekretaris Nasional Solidaritas Perempuan, Solidaritas Perempuan Palu, WALHI Sulawesi Tengah, dan Sikola Mombine yang memberikan bimbingan dan masukan berharga pada desain penelitian, mendukung proses pengumpulan data, dan membantu memvalidasi dan menyelesaikan temuan dan rekomendasi kami.

Laporan ini ditulis bersama oleh tim peneliti inti di ActionAid UK (Anna Parke, Niki Ignatiou dan Anna Goslawska), ActionAid International (Francisco Yermo) dan YAPPIKA-ActionAid (Indira Hapsari dan Andi Nur Faizah). Sebuah tim yang terdiri dari rekan kerja yang terpercaya dan ahli memberikan masukan dan ulasan selama proses penelitian, termasuk Claire Grant, Grace Ireri, Jillian Popkins, Sara Almer, Fransisca Fitri, Kurnia Sri, Hendrik Rosdinar, Michelle Higelin, Carol Angir, Mike Noyes, Kate Carroll dan Amiera Sawas.

Desain oleh www.NickPurserDesign.com

Foto cover: Membangun kembali rumah yang hancur oleh gempa bumi di Sulawesi. Credit: ActionAid

Daftar Isi

Ringkasan eksekutif	04
1. Pendahuluan	07
2. Latar Belakang	08
2.1. Pelokalan dan kepemimpinan perempuan dalam aksi kemanusiaan	08
2.2. Respons bencana dalam konteks Indonesia dan respons Sulawesi Tengah	13
2.3. Pendekatan dan metodologi ActionAid	15
3. Temuan utama	18
3.1. Pelokalan yang dipimpin perempuan dalam praktik	18
3.2. Peluang dan tantangan untuk pelokalan yang dipimpin perempuan	21
4. Rekomendasi	28



Dewi, relawan medis, memeriksa tekanan darah seorang korban berusia 75 tahun Syamsul setelah peristiwa gempa bumi yang terjadi di Sulawesi Tengah pada bulan September 2018.

Credit: Andri Tambunan/ActionAid

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelokalan dan kepemimpinan perempuan dalam aksi kemanusiaan

Rencana ambisius untuk mereformasi sektor kemanusiaan masih belum berhasil untuk secara signifikan mengalihkan kekuasaan dan sumber daya kepada perempuan lokal dan organisasi yang dipimpin perempuan dalam kesiapsiagaan, respons dan upaya pemulihan kemanusiaan. Terlepas dari komitmen untuk melokalkan aksi kemanusiaan, aktor-aktor kemanusiaan, termasuk donor, LSM internasional, dan badan-badan PBB, terus bekerja dengan cara-cara, yang menciptakan adanya hambatan dalam hal finansial, regulasi, dan budaya yang menjunjung tinggi norma patriarkal eksklusif. Hal ini dilakukan untuk menghalangi keterlibatan yang konstruktif dan produktif, mencegah perwakilan yang adil dan akuntabilitas dari bawah ke atas dan juga menghambat peluang untuk inovasi, pembelajaran dan transformasi di seluruh sistem kemanusiaan, termasuk bagi perempuan dan anak perempuan.

Dibangun di atas berbagai kerja ActionAid dan lainnya, penelitian ini membuktikan, dan mengadvokasi sebuah pendekatan untuk pelokalan yang memprioritaskan kepemimpinan perempuan lokal dan organisasi yang dipimpin oleh perempuan, yang selama ini diabaikan, diremehkan, dan tidak memiliki akses ke sumber daya dalam respons kemanusiaan saat ini, terlepas dari

kontribusi unik mereka sebagai perespons pertama dan aktor jangka panjang kunci untuk mengurangi kerentanan dan ketidaksetaraan masyarakat.

Definisi ActionAid tentang 'pelokalan yang dipimpin perempuan' menyoroti bahwa pelokalan harus menjadi proses transformatif yang menempatkan perempuan dan anak perempuan sebagai pusatnya dan menghargai peran penting kepemimpinan perempuan di tingkat lokal sebagai bagian dari aksi kemanusiaan. pelokalan juga sangat menghargai berbagai tanggung jawab yang dihadapi perempuan, termasuk pekerjaan merawat yang tidak dibayar, dan advokasi untuk solusi yang mendukung dan praktis dalam mengatasi masalah ini

Memprioritaskan kepemimpinan perempuan tidak hanya hal yang layak untuk dilakukan dari perspektif, bukti dan pengalaman berlandaskan hak yang menyoroti bahwa perempuan dan organisasi yang dipimpin perempuan menciptakan keterampilan dan aset yang berharga untuk aksi kemanusiaan lokal. Mereka seringkali mendapat akses ke masyarakat yang sulit dijangkau dengan mereka yang paling terpinggirkan di dalamnya, mereka membawa pemahaman yang kuat tentang konteks lokal dan kebutuhan serta realitas perempuan, anak perempuan dan masyarakat secara keseluruhan, dan mereka menawarkan wawasan penting tentang cara untuk terlibat dengan pemangku kepentingan utama. Jika perempuan dan organisasi lokal yang dipimpin perempuan tidak didukung untuk memimpin dalam proses pelokalan, ada risiko bahwa kebutuhan masyarakat tidak akan terpenuhi, dan pengecualian mereka ini akan memperkuat ketidaksetaraan struktural dan melanggengkan kerentanan komunitas mereka.

Pelokalan yang dipimpin perempuan dalam respons Sulawesi Tengah

Pada September 2018, serangkaian gempa bumi dahsyat melanda provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Gempa ini memicu tsunami, mengakibatkan kerusakan yang signifikan dan hilangnya nyawa di seluruh kabupaten yang terdampak di Palu, Donggala, Sigi dan Parimo. Pemerintah Indonesia merespons dengan cepat untuk membentuk kepemimpinan dalam respons ini, menetapkan batasan-batasan pada bentuk keterlibatan internasional dan mengkonfirmasi bahwa bantuan akan disalurkan melalui mitra kemanusiaan nasional atau lokal. Dalam banyak hal, respons ini menjadi tanda pendekatan dan cara kerja 'baru' dalam sektor kemanusiaan, yang memaksa para aktor internasional untuk memikirkan kembali dan memposisikan ulang peran mereka. Namun, komitmen kuat terhadap pelokalan di tingkat pemerintah pusat ini tidak diwujudkan pada sumber daya, dukungan, dan perwakilan yang berarti bagi perempuan lokal dan organisasi yang dipimpin perempuan yang beroperasi di lapangan di Sulawesi Tengah.

Entitas ActionAid di Indonesia, YAPPIKA-ActionAid, adalah salah satu organisasi yang pertama hadir di Palu. Bekerja dengan mitra terpilih, termasuk organisasi yang dipimpin perempuan, YAPPIKA-ActionAid bekerja untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan mendesak di masyarakat yang terdampak, terutama perempuan dan anak perempuan. Mengambil pelajaran dari upaya-upaya ini, dan dalam kemitraan dengan perempuan lokal dan organisasi yang dipimpin perempuan, ActionAid melakukan penelitian untuk memahami tantangan dan peluang untuk pelokalan yang dipimpin perempuan, dalam parameter unik dari respons Sulawesi Tengah.

Temuan Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun visibilitas dan pengakuan terbatas dalam upaya respon resmi di antara para aktor yang bekerja di tingkat nasional dan internasional, berbagai perempuan lokal dan organisasi yang dipimpin perempuan adalah beberapa aktor pertama yang memobilisasi dan merespons di lokasi di Sulawesi Tengah. Individu dan organisasi ini memanfaatkan posisi tepercaya mereka dalam komunitas, dan koneksi serta jaringan yang ada, untuk bergerak cepat dan efektif. Mereka mampu menyediakan layanan utama bagi masyarakat, termasuk mendukung proses evakuasi dan distribusi makanan serta pakaian, bertindak sebagai tenaga medis dan mendukung rekonstruksi sekolah. Selain itu, perempuan dan organisasi lokal yang dipimpin perempuan memainkan peran penting dalam mengidentifikasi dan mendukung kebutuhan perempuan dan anak perempuan yang spesifik dan beragam di masyarakat. Misalnya, dalam menyiapkan dan mengelola ruang aman (termasuk Ruang Ramah Perempuan dan Tenda Ramah Perempuan), memberikan layanan dan dukungan psikososial, dan menciptakan peluang

bagi perempuan dan anak-anak untuk berkumpul dan berbagi pengalaman serta masalah mereka. Mereka juga memainkan peran kunci dalam meningkatkan profil, dan mengadvokasi mengenai masalah utama dengan otoritas lokal dan lembaga pelaksana.

Terlepas dari contoh-contoh yang tersebar tentang perempuan yang memimpin berbagai kegiatan sebagai bagian dari respons kemanusiaan dan proses pemulihan di Sulawesi Tengah, penelitian ini mengidentifikasi beberapa peluang dan tantangan lintas sektoral untuk pelokalan yang dipimpin perempuan dalam konteks ini:

- Ketidaksetaraan gender yang ada diperburuk dan menjadi kacau setelah bencana Sulawesi Tengah. Hal ini memunculkan risiko dan peluang.
- Struktur pengambilan keputusan dan mekanisme koordinasi resmi untuk respons Sulawesi Tengah terus didominasi oleh laki-laki. Namun, beberapa perempuan lokal dan organisasi yang dipimpin perempuan telah mampu menegaskan pengaruhnya dalam ruang pengambilan keputusan lokal.
- Perempuan lokal dan organisasi yang dipimpin perempuan memiliki beragam keterampilan, pengetahuan, dan jejaring yang merupakan aset besar dalam kesiapsiagaan kemanusiaan, respons, dan kegiatan pemulihan. Namun, kurangnya 'keahlian kemanusiaan' dan tantangan kapasitas operasional membatasi keterlibatan penuh mereka.
- Pemerintah pusat telah memperjuangkan pelokalan dalam respons Sulawesi Tengah. Ada juga 'lingkungan kebijakan yang mendukung' untuk memajukan hak-hak dan perlindungan perempuan. Namun, terdapat kurangnya koneksi antara keduanya, serta operasionalisasi terbatas di tingkat lokal.

Rekomendasi

Belajar dari tanggap bencana Sulawesi Tengah dapat membantu memberikan wawasan yang bermanfaat tentang upaya yang lebih luas dari organisasi lokal yang dipimpin perempuan, dan menyoroti pentingnya investasi jangka panjang dalam kepemimpinan perempuan sebelum, selama dan setelah bencana melanda.

Di bawah ini kami uraikan empat rekomendasi untuk aktor kemanusiaan internasional dan lembaga (manajemen bencana) pemerintah, yang dirinci lebih lanjut dalam laporan:

1. **Lembaga kemanusiaan dan donor perlu memahami norma-norma gender dan hubungan kekuasaan yang tidak setara yang membentuk kehidupan perempuan sebelum, selama dan setelah krisis kemanusiaan** dan menunjukkan ini dalam operasional, mulai dari memasukkan analisis feminis dalam asesmen kebutuhan hingga mengenali

beban pekerjaan merawat yang tidak dibayar dan dibayar pada partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam aksi kemanusiaan.

2. **Lembaga kemanusiaan dan donor harus memprioritaskan suara, perspektif dan keterampilan perempuan dalam arsitektur kemanusiaan dan ruang pengambilan keputusan serta dalam organisasi mereka sendiri,** memastikan partisipasi organisasi perempuan lokal dalam sistem *cluster* dan memiliki rencana progresif untuk mencapai kesetaraan gender dan kesetaraan dalam tim kemanusiaan mereka.
3. **Lembaga-lembaga kemanusiaan dan donor harus memperkuat kapasitas mitra lokal untuk menanggapi skala, langkah dan tuntutan unik dari respons kemanusiaan, tetapi untuk melakukannya dengan cara yang mendukung dan menghubungkan dengan ukuran, aspirasi dan keterampilan yang berharga serta keadilan gender dalam jangka lebih panjang** pada organisasi perempuan lokal dan jaringan mereka.
4. **Pelaku penanggulangan bencana dari pemerintah harus memupuk dialog dan kolaborasi yang efektif antara organisasi pemerintah dan non-pemerintah yang beroperasi di tingkat nasional dan lokal,** untuk mendukung implementasi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan dalam kebijakan dan pedoman kedaruratan ke dalam praktik.



Yanti, 38, difoto saat sedang duduk di atas persediaan logistik yang disumbangkan untuk pemulihan Sulawesi Tengah paska gempa bumi.



Credit: ActionAid

1. PENDAHULUAN

Tiga tahun setelah World Humanitarian Summit (WHS), rencana ambisius untuk mereformasi sektor kemanusiaan masih gagal untuk secara signifikan mengalihkan kekuasaan dan sumber daya ke para aktor lokal dalam upaya kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan (bencana). Para penandatangan *Grand Bargain*, termasuk donor, INGO, dan badan-badan PBB, terus bekerja dengan cara-cara, yang menciptakan hambatan finansial, peraturan, dan budaya yang menjunjung tinggi norma patriarkal eksklusif. Organisasi yang dipimpin perempuan lokal¹ masih menerima sebagian kecil dari keseluruhan dana kemanusiaan dan perempuan masih sangat kurang terwakili dalam struktur pengambilan keputusan kemanusiaan resmi dan mekanisme koordinasi. Ini terlepas dari bukti yang semakin kuat dan kuat, yang menyoroti bahwa perempuan lokal dan mitra yang dipimpin perempuan membawa keterampilan dan aset yang berharga untuk tindakan kemanusiaan yang terlokalkan.² Sebagaimana ditegaskan dalam ActionAid dan kritik CARE baru-baru ini tentang *Grand Bargain*, ‘mendengarkan perempuan dan anak perempuan, dan melindungi dan menghormati hak-hak mereka, tidak lagi dapat dilihat sebagai aspek “opsional” dari respons kemanusiaan’.³

Pada bulan September 2018, serangkaian gempa bumi dahsyat melanda provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ini memicu tsunami, yang mengakibatkan kerusakan

signifikan dan hilangnya nyawa di seluruh kabupaten yang terkena dampak Palu, Donggala, Sigi dan Parimo. Pemerintah Indonesia merespons dengan cepat untuk membentuk kepemimpinan dalam responsnya, menetapkan batasan tentang sifat keterlibatan internasional dan mengkonfirmasi bahwa bantuan akan disalurkan melalui mitra kemanusiaan nasional atau lokal. Dalam banyak hal, respons ini menandai pendekatan ‘baru’ dan cara kerja untuk sektor kemanusiaan, memaksa para aktor internasional untuk memikirkan kembali dan memposisikan ulang peran mereka.⁴ Namun, komitmen kuat untuk pelokalan di tingkat pemerintah pusat tidak diterjemahkan menjadi sumber daya yang berarti, dukungan dan perwakilan bagi perempuan dan organisasi lokal yang dipimpin oleh perempuan yang beroperasi di lapangan di Sulawesi Tengah.

Entitas ActionAid Indonesia - YAPPIKA-ActionAid Adalah salah satu organisasi pertama yang mendirikan kehadirannya di Palu. Bekerja dengan sejumlah mitra, termasuk organisasi yang dipimpin perempuan, Solidaritas Perempuan Palu, WALHI Sulawesi Tengah dan Sikola Mombine, YAPPIKA- ActionAid bekerja untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan perempuan dan anak perempuan di masyarakat yang terkena dampak. Mengambil pelajaran dari upaya-upaya ini, dan dalam kemitraan dengan perempuan lokal dan organisasi yang dipimpin perempuan, ActionAid melakukan penelitian untuk memahami, dalam parameter unik dari respons Sulawesi Tengah, tantangan dan peluang untuk pelokalan yang dipimpin perempuan.

2. LATAR BELAKANG

2.1 Pelokalan dan kepemimpinan perempuan dalam aksi kemanusiaan

Konsep seputar pelokalan bantuan kemanusiaan (lihat Kotak 1) telah memiliki daya tarik selama dua tahun terakhir, setelah World Humanitarian Summit 2016, di mana Sekretaris Jenderalnya menyerukan tindakan kemanusiaan untuk menjadi 'selokal mungkin, se-internasional seperlunya'.⁵ Baik didefinisikan sebagai 'pelokalan', 'aksi kemanusiaan lokal' atau 'aksi kemanusiaan yang dipimpin aktor lokal', sektor kemanusiaan terus memperdebatkan tindakan dan reformasi yang diperlukan untuk mendukung lebih banyak respons kemanusiaan lokal.⁶ Sementara ada konsensus luas di seluruh sektor kemanusiaan tentang kontribusi signifikan aktor lokal dan nasional dalam upaya respons, donor, INGO, dan badan PBB terus beroperasi dengan cara yang menciptakan hambatan - secara keuangan, peraturan dan budaya - yang menghambat keterlibatan konstruktif dan produktif dengan masyarakat lokal serta aktor dan sistem nasional.⁷ Ini menghambat peluang untuk inovasi, pembelajaran dan transformasi di seluruh bidang kemanusiaan, yang sebaliknya dapat berkontribusi pada implementasi praktis dari *Grand Bargain*.

Sebagai bagian dari komitmen di bawah Alur Kerja Pelokalan *Grand Bargain* (lihat Kotak 1), ActionAid, dalam aliansi dengan organisasi lain, telah bekerja secara luas untuk melakukan *showcase* pembelajaran dan menghasilkan bukti baru untuk mendukung pelokalan bantuan, serta mengumpulkan dukungan global yang lebih besar untuk kemitraan kemanusiaan INGO-NNGO (lihat Kotak 2). Organisasi masyarakat sipil dari Global South juga telah mulai mendokumentasikan dan melakukan advokasi secara sistematis melawan

ketidakseimbangan ini, termasuk menyoroti isu-isu seputar akses mereka yang terbatas ke pendanaan langsung dan ruang pengambilan keputusan.⁸ Meskipun adanya upaya-upaya ini, hanya 0,4% dari bantuan saat ini yang disalurkan melalui aktor lokal dan nasional,⁹ dan preferensi kontrak dan budaya yang mendukung organisasi yang lebih besar untuk terus bertahan dan mengecualikan aktor lokal.¹⁰

Terlepas dari pekerjaan ekstensif dari organisasi seperti ActionAid, pengakuan kontribusi spesifik kepemimpinan perempuan masih terbatas di antara perdebatan mengenai pelokalan, dan ada hambatan spesifik yang mereka hadapi dalam mengakses peluang ini. Sementara mayoritas penandatanganan *Grand Bargain* secara luas mencakup komitmen untuk mengintegrasikan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dan anak perempuan ke dalam pekerjaan mereka, *Grand Bargain* sendiri tidak menyebutkan secara eksplisit tentang perlunya melakukan hal tersebut.¹¹ Selama Pertemuan Grand Bargain Sherpa di Bonn (September 2016), kelompok informal *Friends of Gender* untuk *Grand Bargain* dibentuk, di mana ActionAid dan organisasi lainnya terus mengadvokasi integrasi kesetaraan gender yang lebih kuat dan pemberdayaan perempuan di semua alur kerja *Grand Bargain*. Secara khusus, kelompok ini menyatakan bahwa keberhasilan Alur Kerja pelokalan bergantung pada 'keterlibatan dan investasi yang sukses pada perempuan dan organisasi perempuan sebagai perespons lokal dan pertama, mengingat realitas kepemimpinan perempuan dalam respons lokal'.¹²

Seperti yang ditegaskan lebih lanjut dalam kritik ActionAid dan CARE baru-baru ini terhadap *Grand Bargain*,¹³ ada juga kebutuhan untuk memperluas dan meningkatkan konseptualisasi pelokalan kita, yang sebagian besar berpusat pada indikator kuantitatif pelokalan, dan gagal mempertimbangkan aspek kualitatif dari kemitraan yang bermakna, termasuk kualitas pendanaan dan penguatan kapasitas.

Kotak 1. Grand Bargain dan pelokalan dalam konteks

Grand Bargain:ⁱ *Grand Bargain* adalah perjanjian antara lembaga kemanusiaan dan donor besar, dengan komitmen untuk membuat ekosistem kemanusiaan lebih efisien, efektif dan berpusat pada orang. Hal ini diberlakukan setelah World Humanitarian Summit 2016, mengakui bahwa pendanaan yang memadai, tepat waktu dan dapat diprediksi sangat penting untuk keberhasilan respon kemanusiaan. *Grand Bargain* mencakup serangkaian perubahan dalam praktik kerja donor dan organisasi bantuan. ActionAid adalah salah satu dari 61 penandatanganan *Grand Bargain* (24 negara anggota, 21 (I)NGOs, 12 lembaga-lembaga PBB, dua gerakan Palang Merah, dan dua organisasi antar pemerintah) yang bekerja pada sepuluh alur kerja untuk mengimplementasikan komitmen ini.

Alur pelokalan:ⁱⁱ Menyusul *Grand Bargain*, serangkaian alur kerja ditetapkan untuk mengedepankan masing-masing dari 10 komitmen *Grand Bargain* dan mempertemukan perwakilan dari para pejabat dan organisasi

bantuan. Secara khusus, Alur Kerja pelokalan berfokus untuk memfasilitasi 'lebih banyak dukungan dan alat pendanaan untuk responder lokal dan nasional' dan dimaksudkan untuk membangun momentum bagi penandatanganan untuk memenuhi komitmen mereka pada agenda pelokalan. Untuk melakukan ini, ada enam komitmen *Grand Bargain* seperti berikut: 1) Meningkatkan dan mendukung investasi multi-tahun dalam kapasitas kelembagaan perespons lokal dan nasional; 2) Bekerja untuk menghilangkan atau mengurangi hambatan yang menghalangi organisasi dan donor untuk bermitra dengan perespons lokal dan nasional; 3) Mendukung dan melengkapi mekanisme koordinasi nasional di mana mereka ada dan memasukkan perespons lokal dan nasional dalam mekanisme koordinasi internasional yang sesuai; 4) Mencapai target agregat global 2020 setidaknya 25% dari dana kemanusiaan untuk perespons lokal dan nasional secara langsung; 5) Mengembangkan dan menerapkan penanda 'pelokalan' untuk mengukur pendanaan langsung dan tidak langsung untuk perespons lokal dan nasional; dan 6) Memanfaatkan alat pendanaan yang lebih besar yang meningkatkan dan meningkatkan bantuan yang diberikan oleh perespons lokal dan nasional.

Mendefinisikan pelokalan: Meskipun tidak ada definisi tunggal pelokalan, para penandatanganan *Grand Bargain* telah berkomitmen untuk 'membuat tindakan kemanusiaan yang berprinsip selokal mungkin dan seinternasional yang diperlukan', sambil terus mengakui peran vital para aktor internasional. Untuk ActionAid, aksi kemanusiaan yang dilokalkan melibatkan pergeseran kekuasaan dan agensi, serta kapasitas finansial dan teknis, kepada perespons lokal dan nasional. Pergeseran ini harus menempatkan perempuan dan organisasi yang dipimpin perempuan di garis depan, membawa pengetahuan kontekstual, keterampilan, dan sumber daya mereka yang tak ternilai untuk membangun kesiapsiagaan darurat, respons, dan pembangunan ketahanan. ActionAid memahami pelokalan sebagai proses transformatif yang menempatkan perempuan lokal dan organisasi yang dipimpin perempuan dari komunitas yang terkena dampak di pusat dan garis depan kesiapsiagaan dan respon kemanusiaan, sebagai bagian dari pendekatan feminis untuk aksi kemanusiaan.



Box 2. Kontribusi ActionAid untuk Pelokalan

ActionAid memprioritaskan bekerja melalui mitra lokal dalam semua pekerjaan kemanusiaan. Hal ini telah memungkinkan organisasi untuk secara signifikan menindaklanjuti dengan komitmen terhadap kepemimpinan perempuan dan pelokalan di bawah *Grand Bargain*. Daripada menekankan kesenjangan tradisional antara negara-negara kaya yang mengumpulkan dana dan negara-negara miskin di mana uang itu dibelanjakan, ActionAid berusaha untuk bekerja sama dalam semangat kesetaraan, demokrasi, dan akuntabilitas. Untuk ActionAid, pelokalan mencakup pergeseran kekuasaan dari internasional ke lokal, dari Utara ke Selatan, dan dari sistem yang didominasi pria ke sistem yang memberdayakan dan menempatkan perempuan dalam peran kepemimpinan dan sentral yang lebih banyak.

Selama World Humanitarian Summit, ActionAid mengupayakan pendekatan ini dengan sejumlah perempuan perespons pertama dari negara-negara yang terkena dampak krisis dan mengadvokasi sistem kemanusiaan yang diperbarui dan direvitalisasi yang sesuai untuk abad ke-21 yang mempromosikan pelokalan respons kemanusiaan khusus, dan memberikan pengakuan, sumber daya dan suara yang lebih besar untuk aktor nasional dan komunitas. Organisasi ini telah berkontribusi pada pembaruan sistem kemanusiaan ini selama bertahun-tahun, melalui berbagai proyek dan inisiatif, seperti diilustrasikan di bawah ini:

Program Akselerasi pelokalan Melalui Kemitraanⁱⁱⁱ (yang dimulai pada November 2017, hingga Oktober 2019), dilaksanakan oleh konsorsium agensi (ActionAid, Christian Aid, CARE, Tearfund, CAFOD, Oxfam), dan mitra lokal mereka, telah membangun tindakan yang diminta oleh program 'Missed opportunities' (dijelaskan di bawah). Ini bertujuan untuk menumbuhkan kekuatan kemitraan yang kuat antara LSM nasional dan lokal dan INGO untuk memperkuat kepemimpinan lokal dalam respon kemanusiaan dan memajukan agenda pelokalan di Myanmar, Nepal, Nigeria dan Sudan Selatan. Program ini adalah salah satu dari hanya beberapa inisiatif yang didanai oleh Departemen Perlindungan Sipil dan Bantuan Kemanusiaan Komisi Eropa dalam mendukung Agenda pelokalan *Grand Bargain*. Program ini telah difokuskan pada menghasilkan bukti dan pembelajaran untuk memahami unsur-unsur operasional kemitraan antara LSM lokal, nasional dan internasional yang paling mungkin untuk mendorong pelokalan aksi kemanusiaan.

Penelitian **Missed Opportunities**^{iv} adalah serangkaian laporan yang dibentuk pada 2013 sebagai bagian dari konsorsium penelitian proyek antara ActionAid dan CAFOD, Christian Aid, Oxfam, dan Tearfund. Laporan-laporan tersebut mendokumentasikan dan meneliti pengalaman kemitraan INGO dengan kelompok-kelompok lokal dalam beberapa respons kemanusiaan (mulai dari gempa Haiti pada 2010 hingga gempa Nepal pada 2015). Penelitian Missed Opportunities menunjukkan bahwa pemahaman aktor nasional dan lokal tentang konteks dan dinamika lokal memungkinkan mereka untuk membentuk program, karenanya, membuat responsnya relevan dan sesuai. Menjelang World Humanitarian Summit, temuan dari penelitian dirangkum dalam sebuah makalah sintesis, Missed Opportunities No More, yang mengadvokasi pelokalan bantuan dan dukungan global yang lebih besar untuk kemitraan kemanusiaan INGO-NNGO. Konsorsium menyerukan sistem kemanusiaan untuk mendorong kapasitas respons kemanusiaan nasional yang giat yang dapat mengimplementasikan respons baik melalui kemitraan atau dengan aktor independen yang akan dicapai melalui penguatan kapasitas bersama; penyesuaian dalam mekanisme sumber daya untuk memberi manfaat bagi sistem nasional dan LSM; dan kemampuan untuk menggunakan kemitraan sebagai sarana untuk meningkatkan kesiapsiagaan.

ActionAid adalah anggota dari **Start Network**, yang mengelola Start Fund, dana gabungan multi-donor yang menyediakan hibah skala kecil untuk keadaan darurat skala kecil hingga menengah yang sering menerima sedikit dana. Dana ini disediakan untuk respons cepat selama 45 hari dengan batas total proyek hingga £ 300 ribu. Proyek dipilih oleh komite lokal, yang terdiri dari staf dari anggota Start Network dan mitra LSM mereka, dalam waktu 72 jam dari peringatan (bencana). Keputusan kapan harus mengeluarkan dana dan lembaga mana diambil oleh anggota Start Network, termasuk ActionAid, tanpa memerlukan persetujuan dari donor lain. Ini menjadikan Start Fund mekanisme respon awal tercepat, dimiliki secara kolektif, di dunia.

ActionAid sebagai anggota konsorsium Start Network mendukung dan memimpin proyek **Shifting the Power (STP)**^v sebagai bagian dari Program Kesiapsiagaan Darurat Bencana (DEPP) pemerintah Inggris. Ini adalah proyek tiga tahun dengan dukungan program selama dua tahun untuk 55 mitra lokal dan nasional di lima negara: Bangladesh, Republik Demokratik Kongo, Ethiopia, Kenya, dan Pakistan, dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas mereka dalam menentukan dan memberikan bantuan kesiapsiagaan dan respon kemanusiaan. Fokusnya adalah untuk mengalihkan kekuasaan ke organisasi lokal yang merupakan perespons pertama dalam respon kemanusiaan, namun seringkali tetap diabaikan dalam sistem kemanusiaan. Proyek ini memiliki tujuan untuk memperkuat kapasitas nasional dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan, dan membantu organisasi nasional mencapai perwakilan, suara, dan pengakuan yang lebih baik. Pada saat yang bersamaan, itu memengaruhi organisasi internasional untuk mendukung dan mempromosikan pekerjaan organisasi lokal dan nasional. Rencana penilaian mandiri kapasitas kemanusiaan dan penguatan kapasitas dilakukan oleh masing-masing organisasi mitra menggunakan kerangka kerja 'Strategic Humanitarian Assessment and Participatory Empowerment' (SHAPE). Sebuah Review Pembelajaran Eksternal^{vi} juga mengungkapkan bahwa selain kapasitas yang ditingkatkan, Shifting the Power juga berinvestasi dalam aspek-aspek berikut yang akan berkontribusi pada kualitas yang lebih baik, respons yang lebih efektif dan akuntabel: (a) kemampuan untuk membawa respons lebih dekat ke masyarakat yang terkena dampak; (b) validasi oleh jaminan kualitas pihak ketiga (Core Humanitarian Standard), dan (c) membangun mekanisme respon pengaduan.

Proyek **Transforming Surge Capacity**^{vii} mirip dengan proyek tiga tahun yang juga merupakan bagian dari DEPP pemerintah dan dipimpin oleh ActionAid. Proyek ini menciptakan daftar bersama yang menggunakan keterampilan dan sumber daya di seluruh sektor untuk memaksimalkan pengetahuan dan sumber daya untuk membantu menargetkan bantuan secara lebih efektif dan membantu lembaga-lembaga nasional dan lokal memainkan peran yang lebih besar. Demikian pula, proyek ini menciptakan platform di tingkat regional dan nasional untuk membangun hubungan yang kuat antar mitra dalam proyek. Platform ini merintis cara baru untuk membuat kapasitas lonjakan lebih kolaboratif. Selama tiga tahun didanai, proyek ini bertujuan untuk 1) Memperkuat sistem melanda nasional dan regional untuk bekerja lebih baik dengan sistem internasional; 2) Membantu organisasi beralih dari fokus pada kapasitas lonjakan individu mereka ke bekerja dengan orang lain untuk membangun kapasitas semua orang; dan 3) Membawa pemangku kepentingan eksternal seperti PBB, perusahaan swasta dan universitas untuk mengeksplorasi bagaimana mereka dapat membantu.^{viii}

Membangun kerja ActionAid dan yang lain secara luas, penelitian ini dan konsep 'pelokalan yang dipimpin oleh perempuan' menarik perhatian eksplisit pada konsep kepemimpinan perempuan karena terkait dengan pelokalan. Definisi kami tentang 'pelokalan yang dipimpin perempuan' (lihat Kotak 3) menyoroti bahwa pelokalan harus menjadi proses transformatif yang menempatkan perempuan dan anak perempuan sebagai pusatnya dan menghargai peran penting kepemimpinan perempuan di tingkat lokal sebagai bagian dari aksi kemanusiaan. Juga sangat mengakui berbagai tanggung jawab yang dihadapi perempuan, termasuk pekerjaan merawat yang tidak dibayar, dan mengadvokasi untuk solusi yang mendukung dan praktis untuk mengatasi hambatan ini

Dari perspektif berbasis hak, memprioritaskan kepemimpinan perempuan pada dasarnya adalah 'hal yang benar untuk dilakukan' karena 'perempuan harus berkontribusi pada keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Perempuan merupakan 50% dari populasi, tetapi seringkali tetap dikecualikan dari kelompok dan proses yang menentukan masa depan mereka sendiri'.¹⁴ Sayangnya, di dunia yang didominasi laki-laki, dunia bantuan kemanusiaan yang patriarkal, kebutuhan dan hak-hak perempuan dapat, dan seringkali diabaikan, diabaikan dan tidak menjadi prioritas. Ini khususnya menjadi masalah ketika mempertimbangkan dampak yang tidak proporsional yang sering dialami perempuan dan anak perempuan selama keadaan darurat kemanusiaan.

Kotak 3. Mendefinisikan Pelokalan yang Dipimpin Perempuan

Agenda pelokalan terus meminggirkan kontribusi spesifik dan krusial dari kepemimpinan perempuan dalam aksi kemanusiaan. *The Grand Bargain* juga diam menanggapi masalah ini.

Untuk ActionAid, kepemimpinan perempuan dapat terjadi di tingkat yang berbeda. Ini melibatkan perempuan dan anak perempuan yang memandu proses, sumber daya dan orang-orang, dan memiliki pengaruh terhadap keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Ini berpusat pada perempuan yang memiliki agensi untuk memilih di mana mereka ingin berada dan bagaimana mereka dapat berkontribusi pada keadilan sosial, kesetaraan gender dan pengentasan kemiskinan. Ini dapat dilakukan dari dalam peran politik atau manajerial, tetapi juga di tingkat lokal, menetapkan agenda dan mempromosikan perubahan.

Pelokalan yang dipimpin perempuan adalah proses yang secara progresif menghubungkan jaringan perempuan nasional dan organisasi perempuan akar rumput, dengan gerakan hak-hak perempuan internasional, untuk menyerukan perubahan radikal dalam hubungan kekuasaan dan sumber daya dalam sistem kemanusiaan. Pelokalan yang dipimpin perempuan memastikan bahwa kepemimpinan dan agensi perempuan berada di pusat pekerjaan kemanusiaan. Ini mengacu pada beragam peran kepemimpinan yang dimainkan oleh berbagai kelompok perempuan dan organisasi yang dipimpin perempuan dalam pengaturan kesiapsiagaan, respons dan pemulihan, yang sering kali kekurangan sumber daya dan diabaikan.

Tidak disarankan bahwa organisasi yang dipimpin perempuan harus menjadi satu-satunya perespons dalam situasi kemanusiaan, atau bahwa kontribusi ini tidak datang dari tuntutan dan beban mereka sendiri. Sebaliknya, konsep ini mempromosikan dan mendukung perempuan, anak perempuan dan organisasi yang dipimpin perempuan, sehingga mereka terwakili secara adil dan dapat memimpin pekerjaan kesiapsiagaan dan respons dalam struktur masyarakat yang terkena dampak dan dalam ruang pengambilan keputusan kemanusiaan global dan nasional.

Memperkuat investasi internasional dan nasional dalam organisasi yang dipimpin perempuan lokal dan dalam peluang mereka untuk kolaborasi, memajukan kehadiran dan pengakuan organisasi yang dipimpin perempuan dalam sistem kemanusiaan. Hal ini akan berkontribusi untuk mengatasi kebutuhan khusus perempuan dan anak perempuan, serta memajukan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dan membuat respons lebih efektif untuk seluruh masyarakat. Ini karena perempuan membawa pemahaman yang kuat tentang konteks lokal dan kebutuhan serta realitas perempuan, anak perempuan dan masyarakat, dan seringkali dapat memperoleh akses ke masyarakat yang sulit dijangkau dan mereka yang paling terpinggirkan. Kontribusi mereka sangat penting tidak hanya dalam respon, tetapi dalam mekanisme kesiapsiagaan, konsultasi, proses pengambilan keputusan dan mekanisme koordinasi pada aksi kemanusiaan.

Di luar kasus intrinsik berbasis hak, perempuan lokal dan organisasi yang dipimpin perempuan membawa keterampilan dan aset yang berharga untuk aksi kemanusiaan yang dilokalkan.¹⁵ Mereka sering mendapat akses pada komunitas yang susah dijangkau dan mereka yang paling termarginalkan di dalamnya, mereka membawa pemahaman yang kuat tentang konteks lokal dan kebutuhan dan realitas perempuan, anak perempuan dan masyarakat secara keseluruhan, dan mereka menawarkan wawasan penting tentang bagaimana cara terlibat dengan para pemangku kepentingan utama. Jika perempuan lokal dan organisasi yang dipimpin perempuan tidak didukung untuk memimpin dalam proses pelokalan ada risiko bahwa kebutuhan masyarakat tidak akan tercapai, dan bahwa pengecualian mereka akan memperkuat ketidaksetaraan struktural. Pengalaman ActionAid menunjukkan bahwa jika Anda menempatkan perempuan di kursi pengemudi, tidak hanya kehidupan dan mata pencaharian mereka akan dilindungi dengan

martabat, tetapi juga masyarakat luas akan mendapat manfaat, dan yayasan dapat menempatkan perubahan transformasional jangka panjang.

Terlepas dari bukti yang terus berkembang dan meyakinkan ini, organisasi yang dipimpin oleh perempuan lokal masih menerima sebagian kecil dari keseluruhan dana kemanusiaan,¹⁶ perempuan masih kurang terwakili dalam struktur pengambilan keputusan kemanusiaan dan mekanisme koordinasi¹⁷ dan kebutuhan perempuan dan anak perempuan masih sebagian besar tidak terpenuhi dalam respons kemanusiaan. Laporan ini mengeksplorasi tantangan ini - dan peluang - dalam konteks respons Sulawesi Tengah di Indonesia untuk memahami realitas pelokalan yang dipimpin perempuan dalam konteks ini dan hal apa lagi yang perlu dilakukan oleh para penandatangan *Grand Bargain* untuk mendukung realisasinya.

Box 4. Dampak bencana Sulawesi Tengah pada perempuan dan anak perempuan

- Asesmen awal mencatat kepadatan shelter (hunian sementara) dan kurangnya privasi, dengan 88% tempat berada di ruang terbuka, dan 81% shelter terbuat dari terpal.^{ix}
- Di 52% lokasi pengungsian, kamar mandi dan/atau toilet diidentifikasi sebagai ruang yang tidak aman untuk perempuan.^x
- Kerusakan ladang makanan berdampak pada kemampuan perempuan untuk menjual kelebihannya, sehingga mengurangi akses mereka ke pendapatan.^{xi}
- Risiko kekerasan berbasis gender diperparah dengan kurangnya struktur koordinasi, kurangnya listrik dan infrastruktur, dan jarak ke, dan kondisi, fasilitas air dan sanitasi kamp.^{xii}
- Karena langkanya makanan, anak perempuan dan perempuan cenderung tidak memiliki akses ke makanan yang tinggi protein dan lemak. perempuan hamil dan/atau menyusui juga memiliki risiko gizi tertentu.^{xiii}

2.2 Respons bencana dalam konteks Indonesia dan Respons Sulawesi Tengah

Terletak di dekat persimpangan lempeng tektonik yang bergeser, Indonesia rentan terhadap bahaya alam seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi, dengan krisis iklim yang sedang berlangsung yang semakin sering menambah badai dan kekeringan tropis yang intens. Indeks Risiko Dunia mengkategorikan negara ini sebagai negara 'berisiko tinggi' bencana,¹⁸ dengan rata-rata 289 bencana awal yang tiba-tiba per tahun dan rata-rata angka kematian tahunan sekitar 8.000 orang.¹⁹

Menanggapi hal ini, pemerintah Indonesia telah berinvestasi dalam sistem manajemen bencana nasional dan lokal dan menghabiskan \$ 300 hingga \$ 500 juta per tahun untuk rekonstruksi pasca bencana. Tsunami Samudra Hindia 2004 menandai titik balik utama kapasitas pemerintah dalam manajemen risiko bencana, termasuk memberlakukan undang-undang baru tentang manajemen bencana pada tahun 2007 (UU 24/2007) dan tahun berikutnya membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang alokasi anggarannya untuk manajemen bencana meningkat 500% dari 2010 ke 2014.²⁰

Pada 9 Agustus 2018, terjadi gempa bumi dengan kekuatan sebesar 6.9 menghantam pulau resor Lombok, menewaskan sedikitnya 430 orang dan melukai lebih dari 1.300 lainnya. Ratusan ribu orang mengungsi, kehilangan tempat tinggal di tengah ratusan gempa susulan yang kuat.²¹ Ini kemudian diikuti oleh bencana lain dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya; pada tanggal 28 September, serangkaian gempa bumi melanda provinsi Sulawesi Tengah Indonesia. Gempa bumi terkuat, dengan kekuatan M7.5 secara keseluruhan,

mempercepat serangkaian guncangan dan getaran yang menyebabkan tsunami, yang mengakibatkan kerusakan signifikan dan hilangnya nyawa di seluruh kabupaten yang terkena dampak di Palu, Donggala, Sigi, dan Parimo. Efek gabungan dari gempa bumi dan tsunami menyebabkan lebih dari 2.000 korban tercatat selama bencana dan 200.000 orang lainnya terusir dari rumah mereka.²²



Credit: Bonifacio Renanda/YAPPIKA-ActionAid

Kotak 5. Respons ActionAid di Sulawesi Tengah

- ActionAid adalah salah satu organisasi pertama yang merespons langsung di Palu. Dalam dua minggu pertama respons, entitas ActionAid Indonesia - YAPPIKA-ActionAid (YAA) - bekerja dengan jaringan organisasi lokal yang disebut 'Sulteng Bergerak' untuk membawa bantuan kepada setidaknya 60.000 orang. Relawan lokal menyediakan perbekalan, menjalankan dapur darurat yang menyajikan makanan hangat bagi para pengungsi dan berpartisipasi dalam misi pencarian dan penyelamatan.
- Segera setelah keadaan darurat, YAPPIKA-ActionAid (YAA) bekerja dengan koalisi Organisasi Masyarakat Sipil lokal yang disebut 'SultengBergerak (SB).' SB dengan cepat memobilisasi tim sukarelawan lokal yang merespons di Palu, Donggala dan Sigi, melakukan asesmen kebutuhan dan menyediakan persediaan bantuan termasuk tenda, terpal, air dan makanan.
- Bersama dengan tiga organisasi lokal, WALHI Sulawesi Tengah, Sikola Mombine dan Solidaritas Perempuan, ActionAid berhasil memberikan makanan, tempat tinggal, perlindungan dan mata pencaharian serta kegiatan akuntabilitas dalam enam bulan pertama respons. Hasilnya meliputi: membangun 25 rumah tumbuh yang menampung 144 orang di Desa Rano, membangun dan mengelola 2 ruang ramah perempuan, melatih 20 perempuan di masyarakat tentang perlindungan dan isu-isu berbasis gender.
- Fase 2 dari respons dimulai pada April 2019 dan berfokus pada pemulihan, menempatkan perempuan pada pusat pembangunan ketahanan di Sulawesi Tengah. YAA dan mitra kini membangun lebih banyak rumah tumbuh dan memperluas kegiatan mata pencaharian melalui bisnis yang dipimpin perempuan.

Pemerintah Indonesia dengan cepat merespons dan menetapkan peran kepemimpinannya, menetapkan pembatasan ketat pada sifat keterlibatan internasional dan menegaskan bahwa bantuan harus disalurkan melalui mitra kemanusiaan nasional atau lokal.²³ Sebagai akibatnya, aktor kemanusiaan internasional dipaksa untuk memikirkan kembali dan mengubah posisi peran mereka dan dalam beberapa minggu pertama respons, 96% dari kegiatan yang dilaporkan dilaksanakan melalui LSM nasional, PMI dan pemerintah.²⁴ Sementara hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan keterlibatan nasional, kegiatan ini tidak diimplementasikan ke dalam peningkatan visibilitas masyarakat lokal dan mitra lokal - khususnya perempuan lokal dan mitra yang dipimpin perempuan dalam asesmen awal, upaya respons, dan ruang pengambilan keputusan yang sedang berlangsung. Ini terutama menyangkut pertimbangan temuan-temuan dari *rapid gender assessments* yang dilakukan oleh mitra pada minggu-minggu pertama tanggapan, yang menemukan bahwa perempuan dan anak perempuan secara tidak proporsional telah terkena dampak bencana (lihat Kotak 4). Organisasi seperti YAPPIKA-ActionAid bekerja dengan mitra yang dipimpin perempuan untuk mencoba dan memenuhi kebutuhan perempuan dan anak perempuan di masyarakat yang terkena dampak.

Ros, seorang juru masak sukarela, mendistribusikan makanan bergizi setelah bencana.



2.3 Pendekatan dan metodologi ActionAid

Dipandu oleh prinsip-prinsip kemanusiaan yang diterima secara global yaitu kemanusiaan, netralitas, imparcialitas, dan kemerdekaan,²⁵ dan didukung oleh Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia (HRBA), kerja kemanusiaan ActionAid dipandu oleh tiga komponen utama: 1) pergeseran kekuasaan, 2) akuntabilitas kepada masyarakat yang terkena dampak dan 3) kepemimpinan perempuan. Ini didukung oleh ketahanan dan keberlanjutan jangka panjang, untuk memberdayakan individu dan mengatasi ketidaksetaraan yang mendasar melalui semua program pembangunan

kami (lihat diagram di bawah untuk informasi lebih lanjut). Pendekatan ini telah dilakukan untuk mempromosikan, mengaktifkan dan mendukung peran, agensi dan kepemimpinan perempuan dalam aksi kemanusiaan, dan perwakilan mereka dalam ruang kebijakan kemanusiaan. Melalui ini, ActionAid menekankan pada pelibatan gerakan sosial dan mitra lokal dalam pengambilan keputusan dan berupaya mewujudkan respon kemanusiaan secara berbeda dari model tradisional, dengan menempatkan masyarakat yang terkena dampak bencana di pusat perdebatan dan lebih kuat mendukung masyarakat untuk mengimplementasikan sistem kemanusiaan untuk bertanggung jawab.

Kekhasan Pendekatan Kemanusiaan ActionAid



Penelitian adalah salah satu alat terkuat ActionAid untuk engagement, dampak, dan pembelajaran program eksternal. Produk-produk penelitian adalah kunci untuk membawa perubahan kekuasaan yang akan memastikan bahwa perempuan dan anak muda yang hidup dalam kemiskinan dan pengucilan dapat mengamankan hak-hak mereka. Untuk mengatasi penyebab struktural kemiskinan dan untuk menantang dan mengalahkan kekuatan patriarkal, dan sistem penindasan yang saling terkait berdasarkan ras, kelas, geografi, orientasi seksual dan identitas gender, kita perlu pengambil keputusan untuk mengubah pandangan dan tindakan mereka. Kita membutuhkan bukti untuk menantang bagaimana dan di mana kekuasaan memanifestasikan dan mereproduksi secara negatif.

ActionAid berkomitmen untuk menantang dan mendiversifikasi mereka yang pengetahuannya diperhitungkan, dimulai dengan peran orang-orang dalam membentuk prioritas dan bukti itu sendiri dan memperkuat narasi alternatif yang berupaya menantang cara orang melihat dan memahami dunia. Penelitian dan analisis kebijakan, dikombinasikan dengan tindakan kolektif dan refleksi berkelanjutan oleh mereka yang terlibat, diperlukan untuk membangun alternatif berbasis bukti untuk meyakinkan para pembuat keputusan untuk berubah. Pendekatan kami dirangkum dalam ActionAid's Research Signature:

Kotak 7. Kekhasan Riset ActionAid

Kekhasan Inti Riset ActionAid	Bagaimana ini diterapkan
Orang yang hidup dalam kemiskinan diberdayakan oleh penelitian kami - baik dalam proses maupun produk:	Aktif dalam mengidentifikasi prioritas dan metodologi penelitian Aktif menggunakan bukti penelitian untuk memengaruhi perubahan di berbagai tingkat Diwakili secara aktif dalam seluruh hasil dan atribusi penelitian; suara diperkuat melalui analisis, perspektif, kutipan, gambar, dan cerita Kepemilikan analisis dan kekayaan intelektual dibagi bersama dengan masyarakat
Analisis feminis yang kuat	Melibatkan partisipasi orang yang hidup dalam kemiskinan dan pengucilan dengan gerakan mereka secara langsung (jika memungkinkan) pada setiap tahap proses penelitian, termasuk dalam mengidentifikasi pertanyaan, analisis bersama yang menyeluruh dan dengan membawa pengetahuan dan strategi baru untuk perubahan Memasukkan lensa kemiskinan dan pengucilan dan analisis titik-temu Melihat keterkaitan penyebab struktural dari pelanggaran hak dari perspektif lokal, nasional, regional dan global Melihat peran dan hak berbagai aktor yang terkait dengan masalah dan dimensi kekuasaan yang menjadi karakteristik hubungan mereka keras, komprehensif, akurat, transparan, etis, dan adil Mengakui kreativitas dan proses penelitian non-tradisional sebagai alat otentik perlawanan dan transformasi
Menghubungkan pekerjaan kami lintas level dan menambahkan nilai sebagai federasi	Bukti pelanggaran hak di tingkat mana pun memberikan dasar untuk perubahan di tingkat lain (lokal, nasional, regional, dan internasional) Pengetahuan dari berbagai tingkatan mendukung kami untuk mengidentifikasi jalur untuk perubahan
Inovatif dan menarik	Berani dalam pesan, audiens, sesuai dan dapat diakses dalam bahasa, dengan strategi perubahan yang jelas Berguna dan digunakan dalam mempengaruhi perubahan praktis di sekitar sasaran strategis ActionAid, seperti juga tepat waktu Relevan dan berlaku di tingkat lokal, nasional dan internasional, yang diukur dengan indikator yang disepakati.
Kemitraan penelitian	Membangun solidaritas, kekuatan, pengetahuan dan kapasitas antara dan di antara ActionAid dan aktor penelitian, komunitas atau organisasi yang berbeda yang terlibat dalam penelitian - dalam kemitraan

Dipandu oleh ActionAid Humanitarian Signature dan ActionAid Research Signature, penelitian ini berfokus pada mengeksplorasi konsep multidimensi kepemimpinan perempuan, dengan mempertimbangkan peran saling terkait dari struktur sosial-budaya dan politik, dan pengalaman individu. Tim penelitian inti dengan perwakilan di seluruh ActionAid UK, ActionAid International dan YAPPIKA-ActionAid (YAA) bekerja sama dengan organisasi yang dipimpin perempuan, Solidaritas Perempuan dan WALHI, untuk membantu merancang penelitian, mengumpulkan data, serta memvalidasi temuan dan rekomendasi. Selain tinjauan

pustaka *rapid desk-based*, data primer dikumpulkan melalui serangkaian wawancara dengan informan kunci dan focus group discussions di Palu, Jakarta dan dari jarak jauh, dengan sejumlah pemangku kepentingan dari organisasi lokal, LSM internasional, LSM, pemerintah dan perwakilan PBB. Kami mengakui keterbatasan penelitian kecil semacam ini; ActionAid ingin mereplikasi, memperkuat, dan memperluas upaya penelitian dan basis bukti di seluruh pekerjaan organisasi kemanusiaan, dan lebih sepenuhnya menerapkan berbagai elemen Research Signature kami, termasuk membawa lensa interseksional yang lebih kuat ke dalam analisis kami.



Elda, seorang relawan medis, memeriksa kesehatan seorang bayi baru lahir di sebuah kebun kelapa yang menjadi tempat pengungsian.

Credit: Andri Tambunan/ActionAid



Yurni, 55, merawat cucunya yang sakit, Zahid-dua tahun, di sebuah tenda darurat.

Credit: ActionAid

3. TEMUAN-TEMUAN UTAMA

3.1 Pelokalan yang dipimpin perempuan dalam praktik

Meskipun visibilitas dalam upaya respons formal terbatas dan pengakuan di antara para aktor yang bekerja di tingkat nasional dan internasional juga terbatas, penelitian ini mengidentifikasi bahwa berbagai perempuan lokal dan organisasi yang dipimpin perempuan adalah beberapa aktor pertama yang memobilisasi dan merespons di lapangan di Sulawesi Tengah. Aktor-aktor ini memanfaatkan posisi tepercaya mereka di masyarakat, dan koneksi serta jaringan yang ada, untuk bergerak cepat dan efektif. Mereka mampu menyediakan layanan utama bagi masyarakat, termasuk mendukung proses evakuasi dan distribusi makanan dan pakaian, bertindak sebagai tenaga medis dan mendukung rekonstruksi sekolah.

Selain itu, perempuan lokal dan organisasi yang dipimpin perempuan telah memainkan peran penting dalam mengidentifikasi dan mendukung kebutuhan khusus dan beragam dari perempuan dan anak perempuan di masyarakat. Sebagai contoh, dalam menyiapkan dan mengelola ruang aman (termasuk Ruang Ramah Perempuan dan Tenda Ramah Perempuan), memberikan layanan psikososial dan penyembuhan trauma, dan menciptakan peluang bagi perempuan dan anak-anak untuk berkumpul bersama dan berbagi pengalaman dan permasalahan mereka. Mereka juga memainkan peran kunci dalam meningkatkan profil, dan mengadvokasi, masalah utama dengan otoritas lokal dan lembaga pelaksana. Kekhawatiran ini termasuk masalah yang dihadapi oleh petani perempuan dan kebutuhan mereka akan lahan untuk penanaman setelah likuefaksi, kebutuhan akan kualitas yang lebih baik dan layanan perlindungan yang disesuaikan, dan kondisi keamanan dan sanitasi di tempat penampungan sementara mereka. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa studi kasus kami di bawah ini, mengenai kepemimpinan perempuan pada respons Sulawesi Tengah yang terdapat dalam

Perempuan lokal dan organisasi yang dipimpin oleh perempuan di Palu telah berkontribusi terhadap respons Sulawesi Tengah dalam berbagai cara:

Memfasilitasi proses evakuasi	Mengelola distribusi makanan dan pakaian	Membina solidaritas dan memperkuat jaringan pendukung	Mendukung rekonstruksi sekolah	Mengelola Ruang Ramah perempuan dan Tenda Ramah perempuan
Memberikan layanan psikososial dan penyembuhan trauma	Menawarkan wawasan penting tentang kebutuhan khusus perempuan dan anak perempuan di masyarakat	Melobi pemerintah tentang keamanan dan sanitasi di tempat penampungan sementara	Kegiatan pertanian memimpin dan menghasilkan pendapatan untuk keluarga dan masyarakat	Melakukan fungsi-fungsi utama sebagai tenaga medis terlatih di masyarakat

berbagai bentuk. Kisah-kisah ini memberikan gambaran singkat tentang beragam pengalaman perempuan di Sulawesi Tengah, namun penting untuk diingat bahwa perempuan tidak membentuk komunitas yang homogen dan bahwa ada banyak perspektif dan suara yang belum

ditangkap menjadi bagian dari studi kualitatif kecil ini. Penelitian lebih lanjut dan analisis feminis interseksional diperlukan bagi kita untuk terus mendokumentasikan dan mengeksplorasi pengalaman perempuan yang beragam dan bervariasi selama aksi kemanusiaan.

Siti Zulaika (Juli), 31, secara aktif terlibat dengan respons bencana Sulawesi tengah

Bekerja dengan Solidaritas Perempuan, sebuah organisasi perempuan lokal, Juli adalah salah satu perespons pertama di Palu, Sigi dan Dongala. Meskipun terkena dampak langsung dari bencana tersebut, ia datang bersama perempuan lain untuk membangun kantor relawan satelit. Seperti yang digambarkan Juli, “ada begitu banyak yang mati. Banyak ibu kehilangan anak-anak dan juga rumah mereka. Selama masa kelim ini, saya khawatir anak saya sendiri, saya tidak tahu di mana putri saya berada karena kami kehilangan jaringan telepon. Ketika saya tahu bahwa dia baik-baik saja, saya merasa lega. Kami semua adalah korban, tetapi ketika kami merasa siap dan kami tahu bahwa keluarga kami baik-baik saja, maka kami dapat fokus pada situasi dan bantuan.”

Juli dan rekan-rekannya mengidentifikasi banyak masalah yang berdampak pada perempuan dan anak perempuan di masyarakat, termasuk kurangnya keselamatan dan sanitasi di tempat penampungan sementara. “Tenda-tenda dibangun dengan bahan yang lemah dan bocor dengan air. Saya melihat satu tenda di mana ada sembilan rumah tangga yang hidup bersama, dengan perempuan dan anak perempuan, pria dan anak lelaki, semuanya di tempat yang sama, yang kami lihat dapat menciptakan risiko pelecehan dan kekerasan.” Di luar dampak fisik bencana, Juli juga menyoroti banyak orang “tidak bisa tidur di malam hari karena mereka masih [mengalami] trauma.”

Sebagai pemimpin di komunitasnya, Juli mengakui lapisan ketidakadilan yang dihadapi oleh perempuan dan anak perempuan dalam respons kemanusiaan dan bahwa keselamatan perempuan adalah yang terdepan dalam tanggapan. Dia percaya bahwa penting bagi perempuan untuk berperan dalam kepemimpinan dalam tanggap darurat. “Sangat penting untuk membangun kepemimpinan perempuan agar kebutuhan dan kapasitas perempuan dan anak-anak akan dikenali,” katanya. “Saya suka proses ini dengan ActionAid karena ini dibangun berdasarkan perspektif gender. Ini membantu menunjukkan skala masalah dan apa yang perlu diprioritaskan untuk membantu keberlanjutan pekerjaan ini.”



Mama Minuk, 54, adalah ibu dari tiga anak, yang desanya (Rogo) terkena dampak gempa bumi dan tsunami.

Setelah bencana, properti dan perumahan Mama Minuk dihancurkan dan, bersama dengan tetangganya, ia terpaksa tinggal di gubuk dan tempat penampungan sementara di dekat bukit tetangga bersama keluarganya.

Di desa Rogo, mitra ActionAid, WALHI Sulawesi Tengah memberikan bantuan dan beberapa kegiatan pascabencana, termasuk kelompok tani, di mana Mama Minuk telah berpartisipasi secara aktif. Ia mengoordinasi dan mengundang perempuan untuk aktif dalam kegiatan kelompok, termasuk menanam kembali, dan telah secara signifikan berkontribusi pada solidaritas dan mata pencaharian perempuan di masyarakat.

Mama Minuk berbicara banyak tentang pentingnya bekerja bersama dan saling mendukung, termasuk berbagi cerita dan berbagi pengalaman sebagai bagian dari proses healing. "Tinggal di tempat penampungan sementara adalah salah satu saat tersulit dalam hidup saya sejauh ini," katanya. "Bergabung dengan kelompok tani dan berkebun bersama perempuan lain membuat saya bahagia - kami dapat berbagi cerita, yang membantu mengurangi trauma saya."



Endang, 20, menyoroti perlunya melibatkan kaum muda dalam penguatan kapasitas dan kegiatan pascabencana.

Termotivasi oleh para petani perempuan di komunitasnya, yang mengambil tindakan segera dan responsif setelah gempa bumi dan tsunami, Endang menjadi bersemangat untuk berpartisipasi dalam kelompok-kelompok perempuan untuk mendukung komunitasnya. Meskipun pada awalnya dia merasa terlalu muda dan takut untuk berbicara di depan umum, dengan dukungan komunitasnya, dia sekarang adalah salah satu anggota termuda dari kelompok petani perempuan WALHI.

Sejak saat itu, ia telah dipilih untuk menjadi anggota Forum Warga di desa Rogo dan merupakan satu-satunya perwakilan anak muda di wilayahnya. Dia menggarisbawahi bahwa "kaum muda juga harus dapat memimpin dan memotivasi orang lain" karena energi dan kreativitas mereka akan membawa pendekatan baru dan berbeda dalam perencanaan. Dia mengerti perlu menciptakan lebih banyak ruang bagi kaum muda untuk memperkuat kapasitas dan kepercayaan diri mereka, dan merekomendasikan pelatihan khusus untuk kaum muda, yang harus dibawa ke pengambilan keputusan masyarakat sedini mungkin.



Fitri, 35, adalah ibu dari tiga anak yang mengadvokasi hak-hak perempuan di komunitasnya.

Setelah bencana, Fitri terpaksa tinggal di tempat penampungan sementara bersama suami dan tiga anaknya. Dia tinggal di salah satu dari *Women Friendly Spaces* atau Ruang Ramah Perempuan yang dikelola oleh Sikola Mombine, yang dia nyatakan sebagai tempat yang aman dan terbuka baginya “untuk mengekspresikan pikiran saya dan membangun motivasi saya untuk perubahan positif”. Melalui kegiatan ini, Fitri membangun kesadarannya tentang masalah perlindungan dan kepercayaan dirinya untuk mendukung perempuan lain di masyarakat untuk membahas masalah ini secara lebih terbuka. Meningkatkan kesadaran tentang hak-hak perempuan mendukung percakapan lebih lanjut di komunitasnya tentang keselamatan perempuan dan perlunya memasukkan lebih banyak mekanisme perlindungan ketika menanggapi respons kemanusiaan. Sekarang, percakapan lebih lanjut sedang berlangsung di komunitasnya tentang pentingnya kesetaraan dalam rumah tangga dan pentingnya peran perempuan tidak hanya sebagai kontributor komunitas mereka, tetapi juga sebagai pemimpin.



3.2 Peluang dan tantangan untuk pelokalan yang dipimpin perempuan

Terlepas dari contoh-contoh luas tentang perempuan yang memimpin berbagai kegiatan sebagai bagian dari respons kemanusiaan dan proses pemulihan di Sulawesi

Tengah, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah peluang dan tantangan lintas sektoral untuk pelokalan yang dipimpin perempuan dalam konteks ini. Bagian berikut ini memberikan gambaran singkat tentang beberapa tema kunci ini, yang diambil langsung dari suara perempuan di lapangan.

Ningsih dari
Kabupaten Donggala,
Sulawesi Tengah.



Credit: Puji Utomo/YAPPIKA-ActionAid

Norma dan kekuasaan gender:

Ketidaksetaraan gender yang ada telah diperburuk dan terganggu setelah bencana Sulawesi Tengah. Ini menciptakan risiko dan peluang.

Telah ada beberapa kemajuan dalam kekuatan pengambilan keputusan dan pengaruh perempuan atas berbagai aspek kehidupan sosial, politik dan ekonomi secara global, tetapi pencapaian ini tetap di bawah ancaman.²⁶ Kemajuan yang terbatas juga menutupi kesenjangan yang signifikan di dalam wilayah dan negara, dan penolakan serta reaksi balasan terus menjadi hal yang umum.²⁷ Norma gender yang dominan,²⁸ yang menetapkan tugas domestik dan merawat untuk perempuan, dan dapat mematahkan semangat mereka dari mengambil peran dalam kehidupan publik, terutama posisi kepemimpinan, terus berlaku. Hal ini terutama penting di negara-negara dengan praktik keagamaan dan/atau patriarki konservatif yang menyebar.²⁹

Tantangan-tantangan ini dimainkan dalam konteks Indonesia. Dalam banyak hal, telah ada kemajuan progresif penting untuk hak-hak perempuan; setelah periode panjang pemerintahan otoriter, negara ini mengalami transisi menuju demokrasi pada tahun 1998, mengantarkan ke periode reformasi politik, sosial dan ekonomi yang disebut 'reformasi'. Selama masa ini, pemerintah menetapkan beberapa kebijakan dan program kelembagaan untuk menangani kebutuhan khusus perempuan, mengarusutamakan isu-isu gender melalui kerja lembaga pemerintah, mengesahkan kebijakan tanpa toleransi terhadap kekerasan terhadap perempuan, dan memperkenalkan langkah-langkah untuk memperkuat perwakilan politik perempuan melalui kewajiban 30 % kuota bagi partai politik untuk memasukkan perempuan dalam daftar kandidat parlemen mereka pada tahun 2013.³⁰ Ada juga gerakan perempuan yang berkembang pesat, yang telah berperan penting dalam melobi agar RUU kekerasan seksual, RUU pekerja rumah tangga, dan RUU hak masyarakat adat disahkan.

Namun, terlepas dari keuntungan ini, budaya patriarkal terus meresap melalui banyak segi budaya Indonesia terlepas dari keberagaman negara ini, hal ini memperkuat ketidaksetaraan dan diskriminasi gender.³¹ Perempuan masih kurang mungkin untuk aktif dalam tenaga kerja formal, memiliki aset produktif dan ikut serta dalam kepemimpinan ekonomi,³² dan rentan terhadap beberapa tingkat kekerasan berbasis gender tertinggi di daerah.³³ Masalah-masalah ini terutama diungkap di Sulawesi Tengah, di mana terdapat masyarakat yang sangat patriarkal; perempuan dan anak perempuan sangat rentan terhadap kekerasan berbasis gender, termasuk perkawinan anak (19% perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, dengan tingkat perkawinan anak yang lebih tinggi di antara anak perempuan dari rumah tangga termiskin), dan sebagian besar dilarang atau dipatahkan semangatnya untuk berpartisipasi dan memimpin dalam kehidupan publik dan pengambilan keputusan.³⁴

Seperti diilustrasikan dalam kasus bencana Sulawesi Tengah, selama dan setelah krisis, ketidaksetaraan gender yang sudah ada, diskriminasi, dan hubungan kekuasaan yang tidak setara dapat diperburuk. Akibatnya, banyak perempuan mengalami kesulitan, termasuk meningkatnya rasa tidak aman, mobilitas terbatas, eksploitasi dan pelecehan seksual, dan kekerasan berbasis gender.³⁵ Mata pencaharian perempuan juga cenderung terpengaruh secara tidak proporsional, dan kurangnya perawatan kesehatan dalam situasi kemanusiaan berdampak pada kebutuhan kesehatan seksual dan reproduksi perempuan.³⁶ *Rapid Gender Assessment* dan wawancara untuk penelitian ini mengungkapkan bahwa situasi perempuan dan anak perempuan di Sulawesi semakin berat setelah bencana. Karena harapan bagi perempuan untuk mengambil pekerjaan merawat yang tidak dibayar dan pekerjaan rumah tangga, perempuan disadari mengalami peningkatan dalam beban kerja mereka setelah hilangnya mata pencaharian suami mereka. Selain itu, banyak sumber pendapatan pribadi mereka yang juga telah hancur (misalnya menjual kelebihan makanan dari ladang makanan, yang telah rusak dalam bencana).³⁷

Wawancara untuk penelitian ini juga menyoroti 'kekosongan kekuasaan', yang dianggap sebagai akibat dari laki-laki di masyarakat yang dialihkan sebagai pencari nafkah tunggal untuk keluarga mereka. Perempuan menggambarkan perasaan kehilangan hak suara ini, dalam beberapa kasus, hal ini berkontribusi terhadap peningkatan potensial kekerasan terhadap pasangan.

"Para ibu mendapat beban dua kali lipat, pekerjaan mereka menjadi dua kali lipat" (responden perempuan dari sebuah komunitas di Palu)

"Kami memiliki budaya patriarki yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Perempuan diberitahu bahwa mereka harus bersikap seperti ini atau berperilaku seperti itu" (responden perempuan dari sebuah komunitas di Palu)

Bukti yang berkembang menunjukkan bahwa dalam masa krisis, mungkin ada peluang langka untuk membentuk kembali peran dan hubungan gender.³⁸ Selanjutnya, masa transisi dan perubahan politik (termasuk proses perdamaian dan reformasi konstitusi pasca konflik) menawarkan peluang penting bagi perempuan untuk mencoba dan menegosiasikan kembali akses atas hak mereka.³⁹ Sementara beberapa bukti telah menyarankan perubahan terbatas dalam pembagian peran antara pria dan perempuan setelah bencana di

Sulawesi Tengah, perempuan yang diwawancarai untuk penelitian ini secara positif menggambarkan peluang baru yang telah dibuat bagi mereka untuk melangkah dan mengambil tentang tanggung jawab baru. Sebagaimana diuraikan, penelitian ini mengidentifikasi banyak contoh kuat tentang solidaritas, kekuatan dan ketahanan perempuan lokal dan organisasi yang dipimpin perempuan yang berkumpul untuk mendukung upaya respons, selain mengambil peran utama dalam pemberdayaan ekonomi dan pilihan mata pencaharian mereka sendiri.

“Sebelum bencana, saya hanya di rumah merawat anak-anak saya dan tidak pernah ikut serta dalam kegiatan di luar rumah. Sekarang saya berpartisipasi dalam kegiatan mata pencaharian ”
(responden perempuan, dari sebuah komunitas di Palu)

“Laki-laki dan suami terbiasa bekerja di luar rumah dan mendapatkan penghasilan. Setelah bencana ini, banyak pria merasa stres karena mereka kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan. Perempuan, termasuk sebagai ibu, tidak bisa diam. Mereka harus memikirkan anak-anak mereka yang perlu makan setiap hari dan harus memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka”
(woman responder, from a community in Palu)

“Ketika saya mengunjungi lokasi proyek, saya melihat bahwa perempuan memegang posisi yang sangat vital di komunitas mereka. Tanpa perempuan, tenda-tenda yang memberi makan orang akan hilang. Tanpa perempuan, semuanya di sini akan hancur berkeping-keping”
(INGO, Palu)

Membahas pengalaman bersama, membangun solidaritas dan keberanian bersama dapat membantu kelompok perempuan menantang norma-norma eksklusif ini. Sebagaimana diuraikan, penelitian ini menemukan banyak contoh perempuan berkumpul untuk memberikan dukungan, memperkuat dan mendorong kegiatan satu sama lain, membantu meningkatkan kekuatan tindakan mereka.

Dalam beberapa kasus, laki-laki di masyarakat dipandang sebagai sekutu dalam upaya ini. Seperti yang ditunjukkan oleh bukti yang lebih luas, seringkali komponen penting dari keberhasilan perempuan dalam peran kepemimpinan adalah laki-laki dan keluarga juga bersedia untuk bertindak melawan ekspektasi dan norma gender dalam masyarakat mereka.⁴⁰ Karena itu keluarga yang mendukung dapat menjadi sumber daya penting bagi kepemimpinan perempuan.⁴¹

“Suami saya mau berbagi peran merawat anak. Setelah menyelesaikan kegiatan atau ikut serta dalam pelatihan, saya selalu memberi tahu suami saya apa yang saya pelajari sehingga dia mengerti tentang hak-hak perempuan. Karena dukungan suami saya, saya termotivasi untuk terus aktif dan terlibat dalam Sikola Mombine”

(responden perempuan, dari sebuah komunitas di Palu)

“Kepemimpinan perempuan dalam tanggap bencana sangat penting - perempuan dapat saling memperkuat satu sama lain”
(organisasi yang dipimpin perempuan, Palu)

Membahas pengalaman bersama, membangun solidaritas dan keberanian bersama dapat membantu kelompok perempuan menantang norma-norma eksklusif ini.⁴² Sebagaimana diuraikan, penelitian ini menemukan banyak contoh perempuan berkumpul untuk memberikan dukungan, memperkuat dan mendorong kegiatan satu sama lain, membantu meningkatkan kekuatan tindakan mereka.

Temuan-temuan dari respons Sulawesi Tengah menekankan pentingnya memahami norma-norma gender dan hubungan kekuasaan yang tidak setara yang membentuk kehidupan perempuan sebelum, selama dan setelah krisis. Penelitian ini juga menyoroti tanggung jawab yang seringkali berlipat ganda dan bersaing serta tidak dibayar yang dibebankan pada perempuan. Agar solusi transformatif gender yang bermakna dirancang dan diimplementasikan, norma-norma gender dan hubungan kekuasaan harus diperiksa dan digeser. Ada peluang bagi para pembuat kebijakan dan praktisi kemanusiaan untuk menghubungkan kebutuhan gender dan ketidaksetaraan gender yang mendasarinya dengan lebih baik.⁴³



Suara dan representasi perempuan:

Struktur pengambilan keputusan formal dan mekanisme koordinasi untuk Respons Sulawesi Tengah terus didominasi oleh laki-laki. Namun, beberapa perempuan lokal dan organisasi yang dipimpin perempuan telah mampu menegaskan pengaruh dalam ruang pengambilan keputusan lokal

Laki-laki terus mendominasi organisasi politik dan lembaga publik mainstream. Kurangnya representasi meluas ke proses dan struktur terkait dalam lingkup perdamaian dan keamanan - misalnya, antara tahun 1990 dan 2017, perempuan hanya merupakan 2% dari mediator, 8% dari negosiator dan 5% dari saksi dan penandatanganan dalam semua proses perdamaian utama.⁴⁴ Pada 2017, perwakilan perempuan di antara pasukan militer hanya 4%⁴⁵ dan pada Operasi perdamaian PBB 10%.⁴⁶

Menariknya, sementara secara luas diakui bahwa pola-pola keterwakilan perempuan yang rendah diterjemahkan melalui sektor kemanusiaan, masih ada kurangnya bukti untuk menggambarkan kesenjangan yang signifikan ini. Data yang tersedia menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok. Sebagai contoh, Komite IASC utama memiliki 19 posisi (ketua, anggota penuh dan undangan) dan

hanya enam di antaranya dipegang oleh perempuan.⁴⁷ Bukti juga menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa contoh praktik yang baik, masih banyak yang harus dilakukan untuk mendorong lebih banyak perempuan untuk ikut serta dan memastikan kesetaraan gender dalam gelombang internasional. Saat ini, perempuan hanya mewakili 40% dari penyebaran gelombang internasional.⁴⁸

Di Indonesia, perwakilan pada level senior perempuan terus rendah di lembaga-lembaga politik dan publik. Meskipun jabatan Presiden Jokowi memiliki jumlah perempuan terbanyak di parlemen (17%), hal ini masih jauh dari persyaratan kuota 30% yang ditetapkan.⁴⁹ Ada sedikit optimisme bahwa Dewan Perwakilan Rakyat berikutnya akan lebih 'sadar gender' mengikuti Pemilihan legislatif 2019 yang mengantar pada persentase perempuan yang lebih tinggi ke DPR, namun, meskipun dengan perolehan ini, jumlahnya tetap rendah.⁵⁰ Kurangnya keterwakilan ini diperluas melalui beberapa lembaga pemerintah, termasuk yang ditugaskan mengelola manajemen bencana, termasuk BNPB. Hal ini pada gilirannya tercermin melalui kurangnya perempuan yang mewakili dengan peran manajemen dalam organisasi pelaksana yang bekerja pada respon kemanusiaan.

“Saya membawa perspektif perempuan, tetapi tim saya semuanya pria.”
(INGO, Jakarta)

“Kami tidak dapat menemukan perempuan untuk peran manajemen”
(INGO, Jakarta)

Orang-orang yang diwawancarai untuk penelitian ini menggarisbawahi bahwa sementara sebagian besar organisasi pelaksana yang bekerja pada respon memiliki jumlah perempuan yang relatif tinggi, terwakili dalam kontingen staf mereka, mereka cenderung untuk menempati peran manajemen yang lebih administratif dan menengah, dengan hanya beberapa perempuan yang diwakili dalam tim manajemen senior.

Selain itu, yang diwawancarai untuk penelitian ini mengidentifikasi kurangnya secara signifikan perempuan lokal dan organisasi yang dipimpin perempuan yang terwakili dalam struktur *cluster* selama tahap awal respons. Untuk sejumlah kecil organisasi yang menghadiri pertemuan-pertemuan ini - termasuk di tingkat sub-cluster (terutama pada GBV) - beberapa telah berhenti hadir karena mereka merasa input mereka tidak diakomodasikan atau dinilai. Pola-pola ini juga diamati selama gempa pada tahun 2009 di Sumatera Barat, di mana organisasi lokal melaporkan bahwa mereka tidak berpartisipasi kuat dalam kegiatan cluster dan untuk mendapatkan akses ke perwakilan pemerintah untuk mempengaruhi tujuan terbukti sulit.⁵¹

Dalam kedua kasus tersebut, perempuan menyebutkan kurangnya informasi, hambatan bahasa (mis. Pertemuan dilakukan dalam bahasa Inggris), dan pilihan transportasi yang terbatas untuk mendukung akses mereka ke pertemuan, di mana perempuan bergantung pada laki-laki atau tidak dapat bergabung karena komitmen mengasuh anak. Meskipun diakui bahwa hambatan ini mungkin dialami oleh semua aktor lokal, bukti menunjukkan norma gender yang melarang dan/atau menghambat partisipasi perempuan (seperti dibahas di atas), kelangkaan representasi perempuan dalam struktur kemanusiaan negara, dan kepercayaan diri yang terbatas bagi perempuan dan organisasi lebih kecil yang dipimpin oleh perempuan, lebih lanjut untuk mengecualikan perempuan lokal. Kurangnya keterwakilan ini dipandang berdampak negatif pada sejauh mana kebutuhan dan prioritas perempuan dan anak perempuan dapat diselaraskan dengan perencanaan dan desain program respons, dan ini disorot oleh orang yang diwawancarai untuk penelitian ini.

Meskipun kurangnya visibilitas dalam struktur pengambilan keputusan formal, sejumlah orang yang diwawancarai memang menarik perhatian pada cara-cara di mana perempuan lokal diberi platform untuk menyuarakan keprihatinan dan saran mereka dalam ruang yang lebih lokal dan informal. Salah satu contohnya, yang dijelaskan oleh beberapa orang yang diwawancarai, merujuk pada ‘Musrenbang’ di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Secara luas ‘Musrenbang’ adalah forum yang biasanya diadakan setiap tahun dan memberikan kesempatan bagi anggota masyarakat untuk berdiskusi dan menyepakati Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang direncanakan untuk tahun anggaran yang akan datang. Wawancara untuk penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan dapat menyuarakan keprihatinan mereka menggunakan platform ini, termasuk dalam kaitannya dengan masalah seperti kondisi tempat tinggal sementara (‘huntara’).

“Organisasi kami tidak terlihat membawa banyak bantuan ke cluster. Dalam diskusi cluster, perempuan tidak dianggap penting dan dianggap remeh. Dalam diskusi tentang penanganan kelompok rentan, kami jarang terlibat.”
(organisasi yang dipimpin perempuan, Palu)

Namun, penelitian ini menemukan perbedaan geografis yang penting dalam hal ini, dengan Palu dan Sigi yang terlihat jauh lebih progresif daripada Dongala. Sementara ruang ‘informal’ ini tidak dilihat sebagai pengganti suara perempuan yang diwakili dalam arsitektur kemanusiaan formal, mereka diakui sebagai contoh penting dari masyarakat yang mendukung potensi kepemimpinan perempuan. Namun, penting untuk dicatat bahwa kekuasaan patriarkal dan elit masih dapat bersirkulasi dalam ruang-ruang ini dan karena itu ada kebutuhan untuk memastikan - alih-alih mengasumsikan - bahwa kekuasaan benar-benar bergeser.

“Di Palu dan Sigi, merupakan hal biasa bagi perempuan untuk memiliki posisi kepemimpinan di desa. Tetapi di Dongala hal ini masih kurang, dan bahkan lebih lagi di daerah pedesaan. Kita perlu melakukan kegiatan untuk membantu perempuan percaya bahwa mereka memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan”
(INGO, Palu)

Temuan-temuan dari respons Sulawesi Tengah menekankan bahwa jika suara, perspektif, dan keterampilan perempuan tidak diprioritaskan dalam arsitektur kemanusiaan dan ruang pengambilan keputusan, masalah mereka cenderung tidak dipahami dan ditanggapi, dan kerentanan serta ketidaksetaraan yang ada dapat menguat. Yang terpenting, ini juga tentang bergerak lebih dari sekadar diberikan akses untuk berpartisipasi, yaitu untuk memperkuat peluang atas pengaruh.

Strategi jangka panjang dan keberlanjutan:
Perempuan lokal dan organisasi yang dipimpin perempuan memiliki beragam keterampilan, pengetahuan, dan jaringan yang merupakan aset besar dalam kesiapsiagaan, respons, dan kerja pemulihan kemanusiaan. Meskipun, kurangnya ‘keahlian dalam kemanusiaan’ dan tantangan kapasitas operasional yang membatasi keterlibatan penuh mereka

Semakin diakui bahwa organisasi lokal yang kecil menghadapi tantangan signifikan selama peningkatan yang cepat selama respon kemanusiaan dalam hal kapasitas operasional mereka.⁵² Bukti dari berbagai respons kemanusiaan juga menyoroti bahwa organisasi yang dipimpin perempuan sering kali ‘dialihkan’ dari agenda strategis mereka dan fokusnya digeser untuk mendukung upaya respons.⁵³ Sebagian besar ini berperan dalam konteks kekuasaan yang tidak setara antara lembaga internasional dengan ‘tingkat yang relatif tinggi dari sumber daya dan wewenang di panggung dunia, dan organisasi lokal – ini dapat berkontribusi pada’ penyimpangan misi’.⁵⁴ Mitra lokal yang beroperasi di seluruh respons Sulawesi Tengah juga menyoroti bahwa banyak LSM dan INGO memiliki mitra implementasi lokal yang sama, yang terlihat memberikan tekanan signifikan pada aktor-aktor lokal dan berkontribusi pada tantangan dan rintangan.⁵⁵ Penelitian baru dari kawasan⁵⁶ menyoroti bahwa sering juga ada kurangnya saling pengertian tentang pengetahuan dan keterampilan yang ada di tingkat lokal versus keahlian yang terkandung dalam kemanusiaan global operasi dan komunitas kebijakan. Bukti telah menunjukkan bahwa ini juga dapat secara khusus disebutkan dalam pekerjaan perlindungan perempuan.⁵⁷

Para perempuan dan organisasi yang dipimpin perempuan yang diwawancarai untuk penelitian ini menyoroti kurangnya pengalaman bekerja dalam respon kemanusiaan sebelumnya. Dari catatan, hampir semua yang diwawancarai menggambarkan kepercayaan diri perempuan yang terbatas dan ada konsensus bahwa penguatan kapasitas diperlukan untuk menumbuhkan keterampilan kepemimpinan mereka khususnya. Ini

datang langsung dari perempuan lokal dan organisasi yang dipimpin perempuan di lapangan, serta dari INGO, LSM, PBB dan perwakilan pemerintah di tingkat Palu dan Jakarta. Penguatan kapasitas dikonseptualisasikan beragam, yang terdiri dari ‘hard’ skills seputar manajemen operasional, keuangan dan hibah, serta ‘softer’ skills di seputar kepemimpinan, koordinasi, negosiasi, strategi, dan pembangunan aliansi. Banyak perempuan yang bekerja di tingkat lokal berbicara secara khusus tentang keinginan untuk belajar dari perempuan lain yang mengelola dan memimpin dalam posisi yang lebih senior dalam organisasi dan pemerintah, yang bekerja di wilayah lain dan wilayah tersebut.

Perwakilan dari beberapa organisasi yang dipimpin perempuan juga menekankan bahwa dalam memfokuskan pada pemenuhan ‘kebutuhan kemanusiaan’ yang baru, pekerjaan hak-hak perempuan jangka panjang mereka, termasuk di bidang-bidang seperti resolusi konflik dan hak-hak tanah perempuan, ditahan sampai batas tertentu. Temuan-temuan dari respons Sulawesi Tengah menyoroti bahwa ada kebutuhan kritis untuk memperkuat kapasitas mitra lokal untuk menanggapi skala, langkah, dan tuntutan respons kemanusiaan yang unik, tetapi untuk melakukan ini dengan cara yang menghormati dan memanfaatkan keterampilan dan pengalaman organisasi yang ada, dan menghubungkannya dengan pekerjaan keadilan gender jangka panjang mereka.

“Rekan-rekan saya kewalahan. Sejak bencana, kantor kami tidak pernah ditutup.”
(organisasi yang dipimpin perempuan, Palu)

“Banyak staf yang awalnya kami temui berasal dari toko-toko dan bisnis - mereka tidak memiliki latar belakang kemanusiaan. Kami benar-benar perlu melakukan pengembangan kapasitas, yang tidak mudah dalam responnya.”
(INGO, Jakarta)

“Kita harus berjuang bersama sehingga perempuan dapat membangun keahlian dan rasa percaya diri mereka sendiri. Beberapa perempuan masih tidak percaya diri dan khawatir mereka akan berbuat kesalahan”
(Organisasi yang dipimpin perempuan, Palu)

Retorika ke realitas: Pemerintah pusat telah memperjuangkan pelokalan dalam respons Sulawesi Tengah. Ada juga ‘lingkungan kebijakan yang mendukung’ untuk memajukan hak dan perlindungan perempuan. Namun, ada pembatasan koneksi antara keduanya, serta pembatasan operasi tingkat lokal.

Dari konteks rawan bencana, orang yang diwawancarai untuk penelitian ini menyoroti pembelajaran penting dan adaptasi yang terjadi di seluruh pemerintah Indonesia, yang menghasilkan pengembangan undang-undang baru dan struktur pemerintah yang khusus menangani bencana seperti BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional Indonesia), yang memfasilitasi kesiapsiagaan dan respons yang dipimpin oleh nasional. Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dalam penanggulangan bencana (AHA Centre) juga terlihat memainkan peran sentral, dengan OCHA dan badan-badan PBB memberikan dukungan pelengkap. Sebagaimana diuraikan, pemerintah merespons dengan cepat untuk menetapkan peran kepemimpinannya dalam respons Sulawesi Tengah, menetapkan batasan-batasan pada sifat dan lingkup bantuan internasional.

Sementara pemerintah Indonesia telah berinvestasi dalam mengembangkan kebijakan yang mendukung dan kerangka kerja legislatif untuk memajukan hak-hak dan perlindungan perempuan, termasuk pedoman yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2018,⁵⁸ telah ada visibilitas terbatas dari komitmen ini dalam arsitektur manajemen bencana yang lebih luas, serta pertimbangan gender yang lebih luas dalam proses penyusunan dan finalisasi Rencana Pemulihan saat ini. Orang yang diwawancarai menghubungkan ini dengan kombinasi faktor, termasuk kurangnya keahlian, kemauan politik dan sumber daya keuangan. Narasumber menekankan karena itu, perlunya menerapkan pendekatan yang lebih sistematis di luar saat bencana untuk memastikan pelaksanaan komitmen ini ketika bencana lain melanda.

Walaupun tidak diragukan lagi terdapat komitmen retorik dan kebijakan yang kuat terhadap pelokalan di tingkat pemerintah pusat, yang diwawancarai menekankan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penghalang utama dalam memajukan kebutuhan artikulasi perempuan dan komunitas mereka di tingkat lokal. Ini terutama dibahas dalam kaitannya dengan penentuan ‘zona merah’ dan kondisi tempat tinggal sementara (huntara) ‘dan tempat tinggal permanen (huntap), di mana perempuan menyatakan frustrasi karena suara dan perspektif mereka tidak dipertimbangkan. Beberapa dari tantangan ini disalahkan pada implementasi ‘top-down’ dari proses konstruksi yang gagal untuk berkonsultasi dengan masyarakat

terlebih dahulu’.⁵⁹ Dalam kasus-kasus ini, pemerintah pusat dipahami memiliki sumber daya dan kekuatan pengambilan keputusan, sebagai lawan dari otoritas tingkat provinsi atau kabupaten. Yang diwawancarai menekankan pentingnya perempuan dan organisasi perempuan menentukan arah kebijakan BNPB (di tingkat nasional) dan BPBD (di tingkat provinsi).

“Di tingkat pemerintah ada kesadaran tentang masalah yang mempengaruhi perempuan, tetapi kesulitannya adalah mengoperasionalkan ini”
(Badan PBB, Jakarta)

“Koordinasi dilakukan oleh BNPB, tetapi kemudian tidak dialirkan di tingkat kabupaten dan provinsi”
(badan PBB, Palu)

Terlepas dari tantangan-tantangan ini, perubahan dalam cara kerja standar menghadirkan peluang baru dan potensi untuk pemrograman berbasis hak yang lebih terhubung secara lokal. Misalnya, untuk respons GBV dalam konteks IDP, UNFPA berfungsi sebagai pemimpin *sub-cluster* secara standar, biasanya disertai oleh INGO atau badan pemerintah. Namun, dalam kasus Sulawesi Tengah, pemerintah mengambil kepemimpinan utama tetapi meminta UNFPA untuk dukungan teknis bila perlu. Orang-orang yang diwawancarai menyarankan bahwa nilai tambah dari pemerintah (lokal) yang memimpin peran ini memungkinkan terjalinnya hubungan yang lebih kuat dengan komunitas lokal yang telah memiliki hubungan, dan dengan demikian dapat menawarkan model penting dalam melanjutkan pelokalan upaya respons. Namun, ada kesepakatan pada seluruh orang yang diwawancarai bahwa masih ada kebutuhan untuk dukungan teknis dari badan-badan khusus PBB dan lembaga-lembaga lain, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan, dan bahwa di luar perubahan dalam proses dan struktur, anggaran harus disediakan untuk mendukung pekerjaan ini.

Prinsip-prinsip ‘selokal mungkin, setaraf internasional diperlukan’ harus ditegakkan sebagai bagian dari upaya ini - pemerintah Indonesia dan organisasi yang dipimpin perempuan harus dimungkinkan untuk melakukan apa yang terbaik, dan didukung untuk mengidentifikasi kesenjangan dan mencari masukan internasional sebagaimana ditentukan oleh mereka bila perlu.

4. REKOMENDASI

Seperti yang disoroti oleh penelitian ini, perempuan lokal dan organisasi yang dipimpin perempuan adalah beberapa aktor pertama yang memobilisasi dan merespons di Sulawesi Tengah. Aktor-aktor ini memanfaatkan posisi tepercaya mereka di masyarakat, dan koneksi serta jaringan yang ada, untuk bergerak cepat dan efektif. Mereka mampu menyediakan layanan utama bagi masyarakat, termasuk mendukung proses evakuasi dan distribusi makanan dan pakaian, bertindak sebagai tenaga medis dan mendukung rekonstruksi sekolah.

Namun, seperti yang ditemukan oleh penelitian ini, meskipun ada narasi kuat tentang pelokalan yang diperjuangkan oleh pemerintah Indonesia, ini tidak ditunjukkan dengan *engagement* yang berarti di tingkat paling lokal. Secara khusus, perempuan dan organisasi yang dipimpin perempuan sebagian besar tidak hadir dalam ruang pengambilan keputusan utama dan menerima sebagian kecil dari keseluruhan anggaran respons.

Belajar dari respons Sulawesi Tengah membantu memberikan wawasan yang bermanfaat tentang upaya yang lebih luas dari pelokalan yang dipimpin perempuan. Penelitian ini menekankan pentingnya investasi jangka panjang dalam kepemimpinan perempuan sebelum, selama dan setelah bencana melanda. Rekomendasi di bawah ini didasarkan pada kesimpulan utama berikut:

- Sangat penting untuk memahami norma-norma gender dan hubungan kekuasaan yang tidak setara

yang membentuk kehidupan perempuan sebelum, selama dan setelah krisis.

- Jika suara, perspektif, dan keterampilan perempuan tidak diprioritaskan dalam arsitektur kemanusiaan dan ruang pengambilan keputusan, isu-isu mereka cenderung tidak dipahami dan ditanggapi, dan kerentanan serta ketidaksetaraan yang ada dapat menguat.
- Ada kebutuhan untuk memperkuat kapasitas mitra lokal untuk merespons skala, langkah dan tuntutan respon kemanusiaan yang, tetapi untuk melakukannya dengan cara yang mendukung dan menghubungkan ke keterampilan yang berharga dari organisasi dan pekerjaan keadilan gender jangka panjang.
- Dialog dan kolaborasi yang efektif harus dipupuk antara organisasi pemerintah dan non-pemerintah yang beroperasi di tingkat nasional dan lokal, untuk mendukung implementasi kebijakan yang bermakna dalam praktik.



Memperbaiki norma dan kekuasaan gender yang membahayakan..

Sangat penting untuk memahami norma-norma gender dan hubungan kekuasaan yang tidak setara yang membentuk kehidupan perempuan sebelum, selama dan setelah krisis.

Lembaga kemanusiaan dan donor harus:

Memastikan bahwa penilaian kebutuhan dan respons yang berkelanjutan serta proses perencanaan pemulihan bergerak lebih dari sekadar menyediakan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia, dan dipandu oleh prinsip-prinsip feminis,ⁱ termasuk melakukan analisisi interseksional feminisⁱⁱ yang ketat yang mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan, dan melibatkan perempuan dalam pengumpulan, analisis, dan pembuatan keputusan selama program.

Memprioritaskan perlindungan perempuan dan anak perempuan pada awal respon darurat dan dalam perencanaan dan kesiapan bencana. Ini harus termasuk melibatkan kerja dengan organisasi yang dipimpin perempuan yang ada untuk menanggapi GBV dan ancaman perlindungan lainnya dan mendukung pembentukan mekanisme berbasis masyarakat bagi perempuan untuk menggerakkan kebutuhan perlindungan mereka sendiri, seperti yang diuraikan dalam ActionAid's Women-Led Community-Based Protection Approach.ⁱⁱⁱ Ini harus mencakup integrasi Tindakan Pencegahan Eksploitasi Seksual dan Pelanggaran, termasuk mekanisme pengaduan dan umpan balik yang dapat diakses dan jelas serta memperluas ruang aman dan ramah yang ada untuk perempuan dan anak perempuan.

Mengenali beban pekerjaan merawat yang tidak dibayar dan dibayar pada partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam aksi kemanusiaan, dan bekerja dengan perempuan dalam kesiapsiagaan, respons dan kegiatan pemulihan untuk mengembangkan dan menerapkan mekanisme praktis yang mendistribusikan kembali beban-beban ini, termasuk layanan pengasuhan anak, dukungan keuangan dan penciptaan ruang inklusif anak.

Berkomitmen untuk keterlibatan jangka panjang dan membangun ketahanan dengan berinvestasi dalam pemberdayaan sosial dan ekonomi perempuan melalui peluang penghidupan yang berkelanjutan bagi perempuan dan bekerja dengan masyarakat untuk mengatasi norma gender yang membahayakan dan menggeser hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan. Kegiatan-kegiatan ini harus diintegrasikan sebagai bagian inti dari pekerjaan pemulihan dan dimasukkan dalam program kemanusiaan di masa depan - alih-alih dilihat sebagai masalah 'pembangunan' mengingat dampaknya pada respons kemanusiaan inklusif gender.

Memperkuat suara dan representasi perempuan

Jika suara, perspektif, dan keterampilan perempuan tidak diprioritaskan dalam arsitektur kemanusiaan dan ruang pengambilan keputusan, masalah mereka cenderung tidak dipahami dan ditanggapi, dan kerentanan dan ketidaksetaraan yang ada dapat menguat.

Lembaga kemanusiaan dan donor harus:

Memastikan massa yang kritis dari organisasi perempuan lokal terwakili secara bermakna di seluruh sistem *cluster*, membangun jaringan dan platform lokal perempuan yang ada. Hal ini dapat didukung dengan memberikan solusi praktis untuk partisipasi perempuan, seperti pilihan pengasuhan anak dan transportasi, dengan membentuk sistem relawan 'teman-teman' *cluster-per-cluster* yang mendukung partisipasi organisasi yang dipimpin oleh perempuan setempat yang didirikan dengan penandatanganan *Grand Bargain* PBB dan INGO, dan memperluas kepemimpinan kelompok ke model tripartit dengan otoritas lokal, PBB dan organisasi yang dipimpin perempuan setempat. Upaya-upaya harus dilakukan untuk berbagi informasi yang relevan tentang arsitektur kemanusiaan yang ada dan komitmen global untuk memastikan perempuan lokal diberdayakan untuk memberi masukan yang berarti dalam pengambilan keputusan.

Memiliki rencana progresif untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kesiapsiagaan, respons, dan tim pemulihan mereka. Ini dapat didukung dengan membangun pemahaman dan kesadaran kelembagaan seputar kesetaraan dan keadilan gender dan mengembangkan proses dan kebijakan untuk mendukung pekerjaan ini - termasuk kapasitas SDM khusus untuk mendokumentasikan dan menanggapi hambatan dan kendala yang dilaporkan dari perempuan dalam staf mereka.

Aktor-aktor lokal harus didukung dengan pengembangan kapasitas, pendampingan, dan dukungan keuangan untuk meningkatkan posisi kepemimpinan dalam sistem cluster nasional (misalnya sebagai co-lead dari Wilayah Tanggung Jawab GBV) dan ini dapat lebih banyak didukung oleh peningkatan atau perubahan inti basis keanggotaan aktor lokal di tingkat global dalam kelompok PBB

Memfasilitasi dan mengumpulkan jaringan dan aliansi organisasi perempuan, termasuk menghubungkan dengan struktur formal dan informal yang ada, dengan fokus untuk membawa kelompok yang dikucilkan dan terpinggirkan ke dalam percakapan dan proses jaringan.^v

Memperkuat strategi jangka panjang dan keberlanjutan <i>Ada kebutuhan untuk memperkuat kapasitas mitra lokal untuk merespons untuk skala, langkah dan tuntutan kemanusiaan yang unik, tetapi untuk melakukannya dengan cara yang mendukung dan menghubungkan ke keterampilan berharga organisasi dan pekerjaan keadilan gender jangka panjang.</i>	Lembaga kemanusiaan dan donor harus: Berkolaborasi dengan perempuan lokal dan organisasi yang dipimpin perempuan untuk mengembangkan rencana penguatan kapasitas kemanusiaan bersama dan dua arah yang mencakup penilaian kapasitas diri organisasi, keterampilan pendampingan dan kepemimpinan, ruang feminis untuk pembelajaran bersama dan pertukaran pengetahuan di suatu negara, dalam level regional dan global - mengambil pembelajaran dan praktik terbaik, termasuk dari kerangka kerja 'Asesmen Kemanusiaan Strategis dan Pemberdayaan Partisipatif' (SHAPE). Menetapkan fasilitas pendanaan multi-tahun yang fleksibel dan langsung yang diperuntukkan bagi organisasi yang dipimpin oleh perempuan lokal untuk terlibat dalam keadaan darurat, yang menyediakan berbagai opsi bertingkat tergantung pada ukuran dan kapasitas organisasi, dan dapat menawarkan pendanaan inti bagi organisasi untuk mempersiapkan dan merespons bencana, serta melanjutkan pekerjaan keadilan gender spesialis jangka panjang mereka yang vital. Lacak dan laporkan pendanaan langsung dan tidak langsung ke organisasi lokal yang dipimpin perempuan dalam keadaan darurat; donor harus menjelaskan kepada lembaga kemanusiaan internasional bahwa mendukung organisasi yang dipimpin perempuan setempat selama keadaan darurat adalah indikator keberhasilan dan permintaan untuk melacak dan melaporkan dana yang diberikan kepada mereka. Cara kerja berdasarkan konsorsium harus didorong melalui mekanisme pengumpulan dana yang ada untuk mendorong kolaborasi berskala besar dan berbagi keterampilan.
Menerjemahkan retorika menjadi kenyataan <i>Dialog dan kolaborasi yang efektif harus dipupuk antara organisasi pemerintah dan non-pemerintah yang beroperasi di kedua negara dan tingkat lokal, untuk mendukung implementasi kebijakan yang berarti ke dalam praktik.</i>	Aktor-aktor pemerintahan (dalam kasus Indonesia ini termasuk BNPB dan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dalam Penanggulangan Bencana) harus: Didukung dengan penguatan kapasitas para ahli dan input teknis untuk membantu membawa hak-hak perempuan dan keadilan gender ke dalam pekerjaan mereka. Melaksanakan dan menyediakan kebijakan dan kerangka kerja legislatif yang ada untuk memajukan hak-hak dan perlindungan perempuan selama keadaan darurat di masa depan. BNPB harus mendorong dan mendukung organisasi perempuan lokal untuk melanjutkan pekerjaan sosial dan keadilan gender jangka panjang, selaras dengan prioritas mereka sendiri, karena ini akan sangat penting untuk mengurangi kerentanan yang meningkat yang dihadapi perempuan di saat krisis. Mulailah dialog tentang peran lembaga manajemen bencana nasional dan organisasi regional dalam mempromosikan pelokalan yang memberi ruang, suara dan pendanaan untuk perempuan dan organisasi yang dipimpin perempuan, bersama dengan aktor nasional lainnya.

- Sebagai sebuah organisasi, ActionAid merangkul prinsip-prinsip feminis interseksional di tempat kerja tidak hanya karena mereka konsisten dengan apa yang kami lakukan, tetapi juga karena kami tahu bahwa prinsip-prinsip itu penting untuk keberhasilan misi kami. Anda dapat mencari informasi lebih lanjut tentang itu di: <https://www.actionaid.org.uk/about-us/how-we-practice-feminism-at-work>.
- Lihat Lisle, A. (2018) 'Intersectional Feminist Discussion Toolkit', ActionAid
- Untuk informasi lebih lanjut tentang Pendekatan Perlindungan Berbasis Komunitas yang dipimpin oleh Perempuan ActionAid, silakan lihat: <https://actionaid.org/publications/2019/our-feminist-approach-protection-emergencies>
- Untuk informasi lebih lanjut tentang Kerangka Kerja Ketahanan ActionAid, silakan lihat: <https://actionaid.org/publications/2016/through-different-lens-actionaids-resilience-framework>
- Dalam kerja sama dengan lembaga-lembaga lain, ActionAid adalah anggota Jaringan Kemanusiaan Feminis - jaringan global para pemimpin perempuan yang berkomitmen pada sistem kemanusiaan yang bertransformasi yang mempromosikan agenda kemanusiaan feminis: <https://www.feministhumanitarianetwork.org/>

Catatan akhir

- Untuk ActionAid, istilah 'organisasi yang dipimpin perempuan' mengacu pada organisasi yang dipimpin atau sebagian besar terdiri dari perempuan dalam posisi kepemimpinan, yang bekerja untuk memajukan kesetaraan gender dan mendukung kebutuhan perempuan dan anak perempuan.
- Lihat Barclay, A., Higelin, M., dan Bungcaras, M. (2017) 'On the frontline: catalysing women's leadership in humanitarian action', ActionAid; Lindley-Jones, H. (2018) 'Women responders: Placing local action at the centre of humanitarian protection programming', Care International UK; Lambert. B., Rhodes, F. and Zaaroura, M. (2018) 'A Feminist Approach to Localization: How Canada Can Support the Leadership of Women's Rights Actors in Humanitarian Action'. Oxfam Canada; Fletcher-Wood, E. and Mutandwa, R. (2019) 'Funding a localised, women-led approach to protection from Gender Based Violence: What is the data telling us?', ActionAid
- Latimir, K. dan Mollett, H. (2018) 'Not what she bargained for? Gender and the Grand Bargain', ActionAid dan CARE International
- Lihat Kelompok Penasihat Kemanusiaan dan Pujiono Center (2019) 'Memetakan norma baru? Kepemimpinan lokal dalam 100 hari pertama tanggap gempa bumi Sulawesi', Seri Makalah Praktek Kemanusiaan
- Seperti yang dijelaskan dan dibahas dalam Barbelet, V. (2018) 'As local as possible, as international as necessary: Understanding capacity and complementarity in humanitarian action'. Kelompok Kebijakan Kemanusiaan di Overseas Development Institute (ODI). Pada World Humanitarian Summit, Sekretaris Jenderal menyerukan aksi kemanusiaan agar 'serapat mungkin lokal, seinternasional mungkin' (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2016, Satu umat manusia: berbagi tanggung jawab. Laporan World Humanitarian Summit, 01376 A/70, Februari, 3–4) pernyataan yang memicu inisiatif, proses, dan debat dalam komunitas kemanusiaan sebagai sarana untuk menemukan tindakan dan reformasi apa yang diperlukan untuk memungkinkan respons kemanusiaan yang lebih lokal. Setelah diskusi ini, ODI menghasilkan laporan untuk menilai debat seputar penguatan kapasitas dan kolaborasi, yang mengkaji dan peluang dan hambatan untuk memanfaatkan kapasitas dan membentuk saling melengkapi yang lebih efektif di antara para pelaku lokal, nasional, regional dan internasional yang menanggapi krisis kemanusiaan.
- Ibid.*
- Lihat Yermo, F. (2017) 'Promoting localised, women-led approaches to humanitarian responses', ActionAid
- Lihat contoh: Majid, N., Abdurahman, K., Poole, L. and Willitts- King, B. (2018) 'Funding to local humanitarian actors. Somalia case study', Overseas Development Institute (ODI)
- Lihat Urquhart, A. and Tichel, L. (2018) 'Global Humanitarian Assistance Report 2018'. Development Initiatives
- Lihat Yermo, F. (2017) 'Promoting localised, women-led approaches to humanitarian responses', ActionAid
- Lihat International Council of Voluntary Agencies (2017) 'Grand Bargain: Aide Memoire Gender Mainstreaming', International Council of Voluntary Agencies (ICVA)
- Ibid.*
- Latimir, K. dan Mollett, H. (2018) 'Not what she bargained for? Gender and the Grand Bargain', ActionAid dan CARE International
- Ruparel, S. (2019) 'Why ActionAid promotes women's leadership in emergencies. ActionAid. Blog available at: <https://actionaid.org/opinions/2019/why-actionaid-promotes-womens-leadership-emergencies>
- Lihat Barclay, A., Higelin, M., and Bungcaras, M. (2017) 'On the frontline: catalysing women's leadership in humanitarian action', ActionAid; Lindley-Jones, H. (2018) 'Women responders: Placing local action at the centre of humanitarian protection programming', Care International UK; Lambert. B., Rhodes, F. and Zaaroura, M. (2018) 'A Feminist Approach to Localization: How Canada Can Support the Leadership of Women's Rights Actors in Humanitarian Action'. Oxfam Canada
- Tidak ada sistem pelaporan global, yang melacak berapa banyak dana kemanusiaan masuk ke organisasi yang dipimpin perempuan lokal. Meskipun ada peningkatan dalam pelacakan dana kepada aktor-aktor lokal, dan ada beberapa tingkat disagregasi lintas sektor, kami tidak memisahkan informasi ini secara sistematis - penelitian baru menemukan bahwa khususnya organisasi yang dipimpin perempuan yang bekerja pada pencegahan dan respons GBV menerima dana langsung minimal - misalnya, lihat: Marsh, M. dan Blake, M. (2019) 'Where is the Money? How the humanitarian system is failing in its commitments to end violence against women and girls' International Rescue Committee and VOICE. Lihat juga Fletcher-Wood, E. dan Mutandwa, R. (2019) 'Funding a localised, women-led approach to protection from Gender Based Violence: What is the data telling us?', ActionAid
- Misalnya, pada Februari 2019 hanya 9 dari 27 Koordinator Kemanusiaan PBB (33%) adalah perempuan - lihat Inter-Agency Standing Committee (IASC) 'Koordinator Kemanusiaan'. Tersedia di: https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/file/dokumen/file/informasi_produk_-_feb_2019_-_list_of_current_hcs.pdf
- Indeks Risiko Dunia menyatakan risiko bencana sebagai akibat dari peristiwa alam yang ekstrem bagi 172 negara di dunia. Ini dihitung berdasarkan negara-demi-negara melalui penggandaan paparan dan kerentanan. Tersedia di: <https://weltrisikobericht.de/english-2/>
- Lihat Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) data. Tersedia di: <https://www.gfdr.org/en/indonesia>
- Ibid.*
- World Vision (2018) '2018 Indonesia earthquake: Facts and FAQs'. Tersedia di: <https://www.wvi.org/blogpost/2018-indonesia-gempa-fakta-dan-faq>
- Update AHA Centre Situation (2018) Update No.15 (FINAL), 26 Oktober 2018. Tersedia di: <https://reliefweb.int/report/indonesia/aha-centre-situasi-pembaruan-no-15-final-m-74-gempa-dan-tsunami-sulawesi>
- Humanitarian Advisory Group and Pujiono Centre (2019) 'Charting the new norm? Local leadership in the first 100 days of the Sulawesi earthquake response', Humanitarian Horizons Practice Paper Series
- Ibid.*
- Bagshaw, S. (2012) 'OCHA on Message: Humanitarian Principles'. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)
- O'Neil, T. and Domingo, P. (2016) 'Women and power. Overcoming barriers to leadership and influence'. London: Overseas Development Institute
- Ibid.*
- Istilah 'norma gender' mengacu pada aturan informal dan harapan sosial bersama yang membedakan perilaku yang diharapkan berdasarkan jenis kelamin, Marcus, R., Harper, C., Brodbeck, S., Page, E. (2015) 'Social norms, gender norms and adolescent girls: a brief Guide'. London: Lembaga Pengembangan Luar Negeri
- O'Neil, T. dan Domingo, P. (2016) 'Perempuan dan kekuasaan. Mengatasi hambatan untuk memimpin dan mempengaruhi'. London: Lembaga Pengembangan Luar Negeri.
- Lihat Yunma, A., Febriany, V., Syukri, M. dan Pereznieta, P. (2012) 'The Politics of gender and Social Protection in Indonesia: Opportunities and challenges for a transformative Approach', London: Overseas Development Institute
- Lihat Cole, H. (2018) 'CARE Rapid Gender Analysis Sulawesi Earthquake and Tsunami Indonesia Version 2'. CARE Internasional
- Menurut Survei Tenaga Kerja Nasional Indonesia - 2009 terdapat kesenjangan gender di hampir semua indikator ketenagakerjaan — 64% perempuan juga berada di sektor informal dan sekitar 75% pekerja migran di luar negeri adalah perempuan dan pada 2008 sebagian besar dari mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga "
- Lihat Basis Data Global UN Women tentang Kekerasan terhadap perempuan <http://evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/asia/indonesia>
- Lihat Cole, H. (2018) 'CARE Rapid Gender Analysis Sulawesi Earthquake and Tsunami Indonesia Version 2'. CAREI Internasional
- Inter-Agency Standing Committee (IASC) (2018) 'The Gender Handbook for Humanitarian Action' dirujuk dalam Lafreniere, J., Sweetman, C., dan Thylin, T. (2019) 'Introduction: gender, humanitarian action and crisis response' - introductory article to Gender & Development issue 27(2) Humanitarian Action and Crisis Response
- See Cole, H. (2018) 'CARE Rapid Gender Analysis Sulawesi Earthquake and Tsunami Indonesia Version 2'. CARE International
- Ibid.*

38. Lihat O'Neil, T., Domingo, P. (2016) 'Women and power: overcoming barriers to leadership and influence'. London: Overseas Development Institute
39. *Ibid.*
40. O'Neil, T., Domingo, P. (2016) 'Women and power: overcoming barriers to leadership and influence'. London: Overseas Development Institute. hal.23. Tersedia di: <https://www.odi.org/publications/10309-women-and-power-overcoming-barriers-leadership-and-influence>
41. *Ibid.*
42. *Ibid.*
43. Sebagaimana dibahas oleh CARE 'menerapkan respons kemanusiaan transformatif gender, bagaimanapun juga, bukan tanpa risiko; menantang akar penyebab ketidaksetaraan gender berarti menantang relasi kuasa yang ada dan norma-norma sosial, yang dapat menghasilkan reaksi sebaliknya. Karena posisi mereka, pelaku eksternal menempatkan risiko ini pada perempuan secara individu. Terlibat lebih awal dengan perempuan yang pertama merespons dalam suatu krisis, dan dengan cara yang lebih bermakna, dapat membantu sektor memahami kapan saat yang tidak tepat untuk mengejar perubahan transformasional, dan bagaimana melakukannya dengan cara yang meminimalkan risiko. Sebagai mereka yang sering menghadapi risiko langsung sendiri, perempuan yang merespons ini harus didukung untuk memilih di mana dan tingkat risiko apa yang mereka respon' dikutip dalam: Lindley-Jones, H. (2018) 'Women responders. Placing local actions at the centre of humanitarian protection programming', Care International UK, hal.28
44. Data dari UN Women and the Council on Foreign Relations (5 Januari 2018); Women Participation in Peace Processes (2019). Tersedia di: <https://www.cfr.org/interactive/womens-participation-in-peace-processes>; UN Women 'Facts and figures: Peace and security'. UN Women. Available at: <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/peace-and-security/facts-and-figures>
45. UN Security Council (2018) 'Report of the Secretary-General on women peace and security' (S/2018/900), para 12. Data disediakan oleh the UN Department of Field Support. Dikutip dari: UN Women Facts and figures: Peace and security, <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/peace-and-security/facts-and-figures>
46. *Ibid.*
47. Inter-Agency Standing Committee (IASC). tersedia di: <https://interagencystandingcommittee.org/>
48. Austin, L. dan O'Neil, G. (2015) 'The State of Surge Capacity in the Humanitarian Sector 2015', Transforming Surge Capacity Project, cited in Ruparel, S., Bleasdale, C. and O'Brien, K. (2017) 'How can Humanitarian Organisations Encourage More Women in Surge?' ActionAid International dan CARE International
49. Mariska, A., M. (2019) 'The Gender Factor: Implications for Women'. S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS)
50. Sebuah perhitungan oleh Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) menunjukkan bahwa persentase anggota parlemen perempuan yang diperkirakan akan duduk di DPR untuk periode 2019-2024 telah meningkat menjadi 20,5 persen. Ramadhani N dan Dipa A (Mei 2019). Lebih banyak anggota parlemen perempuan dapat mendapatkan kursi di DPR, The Jakarta Post [Sumber Online] - Ramadhani, N., F. dan Dipa, A. (2019) 'More female lawmakers to secure seats in House. Jakarta: Jakarta Post. Tersedia di: <https://www.thejakartapost.com/news/2019/05/29/more-female-lawmakers-secure-seats-house.html>
51. Dibahas dalam Harvey, C. dan Smyth, I. (2012) 'Post-Earthquake Response and Reconstructions: Gender-sensitive advocacy in Indonesia', Oxfam
52. Lihat Featherstone, A. (2016) 'Opportunity knocks: Realising the potential of partnerships in the Nepal earthquake response', ActionAid, CARE, CAFOD, Christian Aid, Oxfam GB, Tearfund
53. Anderson, K. (2017) 'Now is the time: Research on Gender Justice, Conflict and Fragility in the Middle East and North Africa', Oxfam and International Alert
54. Lihat Lafrenière, J., Sweetman, C., and Thylin, T. (2019) 'Introduction: gender, humanitarian action and crisis response' - introductory article to Gender & Development issue 27(2) Humanitarian Action and Crisis Response
55. Dibahas dalam the DEC's Real Time Review: Disasters Emergency Committee (2018) 'Real-Time Response Review of the 2018 Indonesia Tsunami Appeal', Disasters Emergency Committee
56. Research led by ActionAid, The Huairou Commission and Monash University, further details here: ActionAid 'Gender Responsive Alternatives for Climate Change', ActionAid Australia. Available at: <https://actionaid.org.au/programs/gender-responsive-alternatives-for-climate-change/>
57. Lindley-Jones, H. (2018) 'Women responders: Placing local action at the centre of humanitarian protection programming', Care International UK
58. 58. Dipublikasikan, P. (2019) 'Rumah Ramah Perempuan Cegah Perempuan Alami Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana' Kemenpppa. Tersedia di: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2299/women-friendly-space-prevent-pervents-experience-violence-based-gender-in-disaster>
59. Tinjauan DEC's Real Time: Disasters Emergency Committee (2018) 'Real-Time Response Review of the 2018 Indonesia Tsunami Appeal', Disasters Emergency Committee

Catatan akhir kotak

- i. Lihat <https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain>
- ii. Lihat http://media.ifrc.org/grand_bargain_localisation/
- iii. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang project dan tautan ke publikasi yang relevan, silakan kunjungi: <https://www.christianaid.org.uk/about-us/programmes/accelerating-localisation-through-partnerships>
- iv. Berkomitmen untuk keterlibatan jangka panjang dan membangun ketahananiv dengan berinvestasi dalam pemberdayaan sosial dan ekonomi perempuan melalui peluang penghidupan yang berkelanjutan bagi perempuan dan bekerja dengan masyarakat untuk mengatasi norma gender yang membahayakan dan menggeser hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan. Kegiatan-kegiatan ini harus diintegrasikan sebagai bagian inti dari pekerjaan pemulihan dan dimasukkan dalam program kemanusiaan di masa depan - alih-alih dilihat sebagai masalah 'pembangunan' mengingat dampaknya pada respons kemanusiaan inklusif gender.
- v. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang project dan tautan ke publikasi yang relevan, silakan kunjungi: <https://startnetwork.org/start-engage/shifting-the-power>
- vi. Learning Review 1.2 (2017) <https://startnetwork.org/resource/how-has-shifting-power-influenced-local-and-national-partners-response-emergencies>
- vii. <https://startnetwork.org/start-engage/transforming-surge-capacity>
- viii. <https://startnetwork.org/>
- ix. Emergency Capacity Building Consortium & Humanitarian Forum Indonesia (2018). Joint Needs Assessment Sulawesi Earthquake and Tsunami, 9 October 2018, Dibahas dalam UN Women (2018) 'Gender and Inclusion Alert: Central Sulawesi Earthquake and Tsunami'.
- x. DTM Putaran 1. Dibahas dalam UN Women (2018) 'Gender and Inclusion Alert: Central Sulawesi Earthquake and Tsunami'.
- xi. CARE Rapid Gender Sulawesi Earthquake and Tsunami Indonesia Version 2. (2018), CARE Indonesia
- xii. UN Women (2018) 'Gender and Inclusion Alert: Central Sulawesi Earthquake and Tsunami'.
- xiii. CARE Rapid Gender Sulawesi Earthquake and Tsunami Indonesia Version 2. (2018), CARE Indonesia
- xiv. Anda bisa mendapatkan informasi lebih lanjut di respons ActionAid's di: <https://www.actionaid.org.uk/about-us/what-we-do/emergencies-disasters-humanitarian-response/tsunami-in-indonesia-2018>



Perempuan memasak
di dapur umum di tenda
pengungsian di Palu.

Credit: Bonifacio Renanda/YAPPIKA-UN Women Aid

Changing the world
with **women and girls**
act:onaid

 @ActionAidUK

 ActionAidUK

 @ActionAidUK

www.actionaid.org.uk

ActionAid is a charitable company limited by guarantee and registered in England and Wales (Company number 01295174). England and Wales charity number 274467, Scottish charity number SC045476. Registered Office 33-39 Bowling Green Lane, London EC1R 0BJ.